

**WAHANA HIJAU**  
*Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*  
ISSN 1858-4004  
Volume 4, Nomor 2, Desember 2008

**DAFTAR ISI**

- Pengaruh Kegiatan Optimasi Lahan terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Nagori/Desa Naga Saribu, Kecamatan Pamatang Silima Huta)**  
*Debora D.P.I. Hutasoit* Hal. 51 – 58
- Pengaruh Keberadaan PT. PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Talikumain terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Talikumain, Kecamatan Tambusai)**  
*Hayatul Muchni* Hal. 59 – 65
- Pengaruh Program Semai Benih Bangsa terhadap Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kabupaten Aceh Utara**  
*Irfansyah I.S.* Hal. 66 – 78
- Destination Brand: Membangun Keunggulan Bersaing Daerah***  
*Syafrizal Helmi Situmorang* Hal. 79 – 86
- Pembinaan dan Pemanfaatan Ekonomi Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah**  
*Jhon Harlen Sitompul* Hal. 87 – 93
- Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Utara (Studi Kasus: Wilayah Pantai Timur)**  
*Marganda Simamora dan Sirojuzilam* Hal. 94 – 101

WAHANA HIJAU	Volume 4	Nomor 2	Hal.: 51 – 101	Medan, Desember 2008	ISSN: 1858-4004
--------------	----------	---------	----------------	----------------------	-----------------

# **PENGARUH KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN (Studi Kasus Nagori/Desa Naga Saribu, Kecamatan Pamatang Silima Huta)**

**Debora D.P.I. Hutasoit**  
PWD SPs USU Medan

***Abstract:** Rural and agricultural development in the future should be an attempt to improve the welfare of farmers that can push the materialization of rural economic development through productive and competitive activities. Agricultural commodities have not been able to meet domestic need and play its role as foreign exchange resource. Current critical problem is that the increase of agricultural production (agribusiness) is not yet in line with the significant increase of income and welfare of farmers. In Simalungun district, 9.9% of the area which is not yet productively used becomes a challenge in agricultural development.*

*The objective of the study is to know the difference in use of uncultivated land into a productive one, employment, the average income rate of farming household prior and after implemented the land optimization and even the effect of the land area and manpower of the optimization on the income of farmers in Nagori/Naga Saribu Village of Pamatang Silima Huta Subregency.*

*The method used in the study included a significance test (paired samples t-test and multiple linier regression). The data included the primary one collected from the households of agriculture in Nagori/Naga Saribu Village and the secondary one collected from some related institutions.*

*The result of the study shows that the mean difference of land area used was 1.4 hectares each farmer before and 2.4 hectares each farmer after the activity of land optimization in Naga Saribu Village. The mean difference of manpower employed ranged from 66 person year each farmer before to 173 person year each farmer after the activity of land optimization. The mean difference of farmers' income ranged from Rp. 16,117,998/year each farmer before to Rp. 21,883,895/year each farmer after the activity of land optimization. There is a positive and significant influence of the variables of land area and manpower on the income of farmers after the activity of land optimization in Naga Saribu Village.*

***Keywords:** activity of land optimization, land, manpowe, and income*

## **PENDAHULUAN**

Kedudukan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi bangsa adalah cukup nyata. Hal ini dapat dilihat dari proporsinya terhadap pendapatan nasional. Selain kontribusinya melalui GDP, peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi bangsa sangat luas, mencakup beberapa indikator antara lain: pertanian sebagai penyerap tenaga kerja yang terbesar, pertanian merupakan penghasil makanan pokok penduduk, komoditas pertanian sebagai penentu stabilitas harga, pembangunan pertanian sangat penting untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor, komoditas pertanian merupakan bahan industri manufaktur pertanian, dan pertanian memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi.

Beberapa dekade terakhir ini sektor pertanian hanya diperlakukan sebagai sektor pendukung yang mengemban peran konvensional yang cenderung mengamankan kondisi makro yaitu dalam kaitan stabilitas ekonomi nasional, dengan kurang memperhatikan keberpihakan kepada kepentingan kesejahteraan petani selaku pelaku sentral. Fenomena ini dengan mudah dapat dibuktikan dengan terpeliharanya stabilitas ekonomi nasional hingga pertengahan 1997, akan tetapi tingkat kesejahteraan petani pada umumnya belum membaik secara signifikan. Selama ini sektor pertanian terlalu menekankan kepada peningkatan produksi dan kurang stimulan dengan kepentingan kesejahteraan petani (*welfare oriented*).

Pembangunan pertanian dan perdesaan masa mendatang harus merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu diharapkan mampu mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi perdesaan melalui kegiatan-kegiatan produktif dan berdaya saing.

Komoditi pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sumber devisa. Masalah yang dihadapi saat ini adalah bahwa meningkatnya produksi pertanian (agribisnis) selama ini belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan. Petani sebagai unit agribisnis terkecil belum mampu meraih nilai tambah yang rasional sesuai skala usaha tani terpadu (*integrated farming system*). Membangun kelembagaan (*institution*) di bidang pertanian dalam pengertian yang luas menjadi semakin penting. Hal ini penting agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang tidak hanya *on farm business* saja akan tetapi terkait erat dengan aspek-aspek *off farm businessnya*

Strategi dasar pengembangan pertanian adalah merubah pola pikir konvensional petani dari orientasi produksi ke arah bisnis komersial. Hal ini hanya dapat dicapai dengan dukungan kelembagaan yang mantap termasuk penyediaan lembaga finansial perdesaan dan pengembangan teknologi.

Globalisasi semakin gencar, namun timbul kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu memecahkan masalah. Hal ini membawa implikasi semakin perlunya menata kembali landasan sistem pengelolaan sumberdaya lahan pertanian.

Penataan yang dimaksud menyangkut 4 (empat) sifat pokok, yaitu: pemerataan (*equitability*), keberlanjutan (*sustainability*), kestabilan (*stability*) dan produktivitas (*productivity*).

Dari data Statistik Tanaman Pangan dan Penggunaan Lahan Kabupaten Simalungun, bahwa Kabupaten Simalungun memiliki Luas wilayah 438.660 Ha, dimana dari luas tersebut masih terdapat 43.441 Ha (9,9% dari luas wilayah) yang belum diusahakan atau masih berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Fakta yang menunjukkan luasnya lahan di Kabupaten Simalungun tersebut yang belum

dimanfaatkan secara produktif menjadi tantangan dalam pembangunan di bidang pertanian, mengingat kondisi wilayah Kabupaten Simalungun secara umum sesuai dengan pengembangan sektor pertanian.

Kegiatan Optimasi Lahan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan lahan terlantar. Kegiatan ini merupakan program yang dilaksanakan secara nasional, yang dikelola oleh Direktorat Pengelolahan Lahan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian. Program ini hanya bersifat stimulan bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah perdesaan dengan mengembangkan sistem kelembagaan masyarakat.

Kecamatan Pematang Silima Huta merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Simalungun merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Induk Silimakuta. Sesuai dengan konsep pemekaran wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sudah selayaknya setiap program pembangunan, seperti program atau Kegiatan Optimasi Lahan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah yang ada.

Salah satu desa di wilayah Kecamatan Pematang Silima Huta yaitu Nagori/Desa Naga Saribu merupakan *pilot project* pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dengan pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Simalungun. Hal ini dimungkinkan mengingat kekuatan internal yang terdapat di kecamatan itu seperti sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya. Nagori/Desa Naga Saribu, Kecamatan Pematang Silima Huta terletak di perbatasan antara Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. Nagori/Desa Naga Saribu sangat dekat dengan lokasi STA (Sub Terminal Agribisnis) Kabupaten Simalungun dan juga STA (Sub Terminal Agribisnis) Kabupaten Karo. Hal ini membuka peluang pasar yang cukup menjanjikan bagi hasil produksi pertanian dari nagori/desa tersebut.

Mengingat pentingnya optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan dalam mewujudkan pertanian yang maju, efisien dan tangguh, maka penulis tertarik

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kegiatan Optimasi Lahan Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Nagori/Desa Naga Saribu Kecamatan Pamatang Silima Huta).

## METODE

Perbedaan nyata pemanfaatan lahan terlantar menjadi lahan produktif sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan optimasi lahan di Nagori/Desa Naga Saribu Kecamatan Pamatang Silima Huta. digunakan analisis uji beda rata-rata untuk sampel berpasangan (*paired samples t-test*). dengan Rumus yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\bar{x}_{1,i} - \bar{x}_{2,i}}{\sqrt{s^2 p \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Dimana:

$\bar{x}_{1,1}$  = Rata-rata luas lahan rumah tangga petani yang diusahakan sebelum pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan.

$\bar{x}_{2,1}$  = Rata-rata luas lahan rumah tangga petani yang diusahakan setelah pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan.

$\bar{x}_{1,2}$  = Rata-rata jumlah tenaga kerja (HOK) yang digunakan sebelum pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan.

$\bar{x}_{2,2}$  = Rata-rata jumlah tenaga kerja (HOK) yang digunakan setelah pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan.

$\bar{x}_{1,3}$  = Rata-rata pendapatan rumah tangga petani sebelum pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan.

$\bar{x}_{2,3}$  = Rata-rata pendapatan rumah tangga petani setelah pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan.

$n_1$  = Jumlah sampel rumah tangga petani sebelum pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan.

$n_2$  = Jumlah sampel rumah tangga petani setelah pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan.

$s^2 p$  = Simpangan baku berpasangan

Pengaruh penggunaan lahan dan penggunaan tenaga kerja terhadap tingkat pendapatan rata-rata rumah tangga setelah pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan, digunakan analisis uji regresi linier berganda (*Multiple Linier Regression Test*), dengan persamaan:

$$\hat{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \mu$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Pendapatan Petani.  
 a = Konstanta  
 $b_1$  dan  $b_2$  = Koefisien regresi.  
 $X_1$  = Variabel luas lahan  
 $X_2$  = Variabel tenaga kerja  
 $\mu$  = Error Term

## HASIL

Program Kegiatan Optimasi Lahan dilatar belakangi pemikiran bahwa lahan pertanian adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena lahan merupakan media tumbuh bagi tanaman. Banyak lahan-lahan pertanian terlantar atau lahan yang sementara belum diusahakan secara optimal, tetapi apabila diberikan sentuhan teknologi maka lahan dimaksud dapat menghasilkan produksi yang optimal (Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, 2006).

Kegiatan optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih produktif. Kegiatan optimasi lahan pertanian diarahkan untuk memenuhi kriteria lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dari aspek teknis bentang lahan, perbaikan fisik dan kimiawi tanah, serta peningkatan infrastruktur usahatani yang diperlukan.

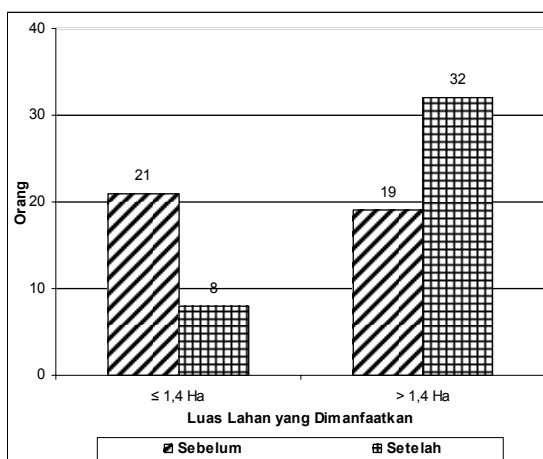
Kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk menunjang terwujudnya ketahanan pangan danantisipasi kerawanan pangan, khususnya 3 (tiga) komoditi utama yaitu padi, jagung dan kedelei. Khusus di Kabupaten Simalungun (Kecamatan Pematang Silima Huta) komoditi yang dikembangkan adalah jagung.

**PEMBAHASAN**

**Analisis Dampak Kegiatan Optimasi Lahan terhadap Pemanfaatan Lahan Terlantar Menjadi Lahan Produktif**

Hasil penelitian menunjukkan luas lahan yang dimanfaatkan dari 40 responden sebelum kegiatan optimasi lahan rata-rata 1,4 hektar setiap petani. Setelah dilakukan kegiatan optimasi lahan luas lahan yang dimanfaatkan meningkat menjadi rata-rata 2,4 hektar setiap petani. Dengan demikian ada peningkatan lahan yang dimanfaatkan 1 hektar setiap rumah tangga setelah kegiatan optimasi lahan.

Sebelum dilakukan kegiatan optimasi lahan, yang memanfaatkan lahan pertanian  $\leq 1.4$  Ha sebanyak 21 orang (52,5%), sedangkan yang memanfaatkan lahan  $> 1.4$  Ha sebanyak 19 orang (47,5%). Setelah dilakukan kegiatan ada peningkatan 13 responden yang memanfaatkan lahan  $> 1.4$  Ha menjadi 32 orang (80,0%), sehingga yang memanfaatkan lahan pertanian  $\leq 1.4$  Ha berkurang menjadi sebanyak 8 orang (20,0%).



**Gambar 1. Perubahan Luas Lahan Sebelum dan Setelah Kegiatan Optimasi Lahan**

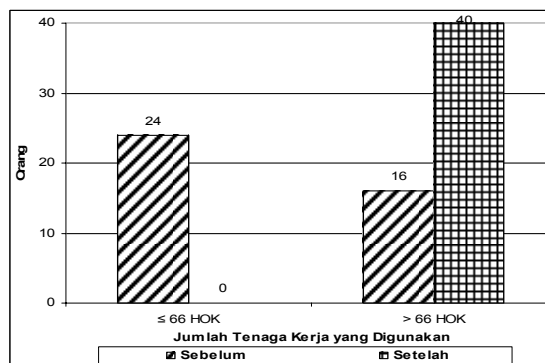
Pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan optimasi lahan diukur berdasarkan perbandingan luas lahan yang dimanfaatkan responden sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil uji statistik menunjukkan tingkat perbedaan yang nyata ( $t_{hitung} = 14.266$ ) lebih besar dari ( $t_{tabel} = 1,684$ ), artinya terdapat perbedaan yang positif dan signifikan luas lahan yang dimanfaatkan sebelum dan setelah dilakukan Kegiatan Optimasi Lahan. Nilai signifiansi sebesar 0,000 pada uji *t-test* menunjukkan bahwa luas lahan yang dimanfaatkan berbeda

sebelum dan setelah dilakukan Kegiatan Optimasi Lahan.

**Analisis Dampak Kegiatan Optimasi Lahan terhadap Kesempatan Kerja**

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan tenaga kerja dari 40 responden rata-rata 66 HOK/rata-rata luas lahan setiap petani, setelah dilakukan kegiatan optimasi lahan jumlah tenaga kerja yang digunakan rata-rata 173 HOK/rata-rata luas lahan setiap petani. Dengan demikian ada peningkatan jumlah tenaga kerja 106 HOK/rata-rata luas lahan setelah kegiatan optimasi lahan. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini sejalan dengan peningkatan luas lahan yang dimanfaatkan, yaitu rata-rata 1 hektar setiap responden, artinya peningkatan tenaga kerja sebanyak 106 HOK/rata-rata luas lahan setiap petani.

Sebelum dilakukan kegiatan optimasi lahan, yang memanfaatkan tenaga kerja  $\leq 66$  HOK/rata-rata luas lahan sebanyak 24 orang (60,0%), sedangkan yang menggunakan tenaga kerja  $> 66$  HOK/rata-rata luas lahan sebanyak 16 orang (40,0%). Setelah dilakukan kegiatan ada peningkatan 24 responden yang menggunakan tenaga kerja  $> 66$  HOK/rata-rata luas lahan menjadi 40 orang (100,0%).



**Gambar 2. Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Sebelum dan Setelah Kegiatan Optimasi Lahan**

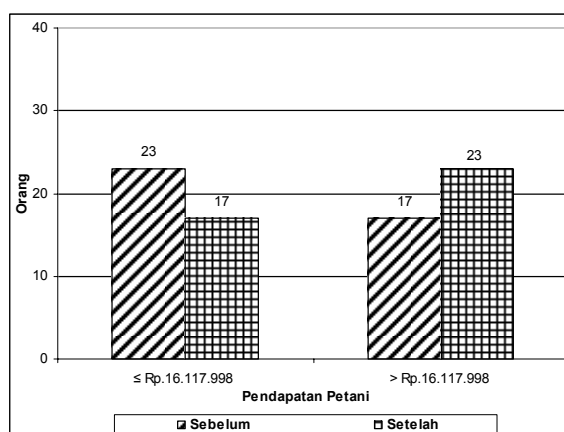
Pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan optimasi lahan diukur berdasarkan perbandingan jumlah tenaga kerja yang digunakan responden sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil uji statistik menunjukkan tingkat perbedaan yang nyata ( $t_{hitung} = 12.607$ ) lebih besar dari ( $t_{tabel} = 1,684$ ), artinya terdapat perbedaan yang positif dan signifikan jumlah tenaga kerja

yang digunakan sebelum dan setelah dilakukan Kegiatan Optimasi Lahan. Nilai signifikansi sebesar 0,000 pada uji *t-test* menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan berbeda sebelum dan setelah dilakukan Kegiatan Optimasi Lahan.

### Analisis Dampak Kegiatan Optimasi Lahan terhadap Peningkatan Pendapatan Petani

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan petani responden adalah Rp.16.117.998/tahun setiap petani. Setelah dilakukan kegiatan optimasi lahan pendapatan rata-rata petani meningkat menjadi Rp.21.883.895/tahun setiap petani. Dengan demikian ada peningkatan pendapatan petani rata-rata Rp.5.715.898/tahun setiap petani dari lahan yang dimanfaatkan setelah kegiatan optimasi lahan.

Sebelum dilakukan kegiatan optimasi lahan, jumlah petani yang mempunyai pendapatan  $\leq$  Rp.16.117.998/tahun sebanyak 23 orang (57,5%), sedangkan jumlah petani yang mempunyai pendapatan  $>$  Rp.16.117.998/tahun sebanyak 17 orang (42,5%). Setelah dilakukan kegiatan ada peningkatan 6 responden yang mempunyai pendapatan  $>$  Rp.16.117.998/tahun menjadi 23 orang (57,5%).



**Gambar 3. Perubahan Pendapatan Petani Sebelum dan Setelah Kegiatan Optimasi Lahan**

Pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan optimasi lahan diukur berdasarkan perbandingan pendapatan responden sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan yang positif dan signifikan jumlah

pendapatan petani sebelum dan setelah dilakukan Kegiatan Optimasi Lahan. Nilai signifikansi sebesar 0,000 pada uji *t-test* menunjukkan bahwa pendapatan petani benar-benar berbeda sebelum dan setelah dilakukan Kegiatan Optimasi Lahan.

### Analisis Pengaruh Luas Lahan dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Petani

Secara bersamaan model statistik regresi linier berganda dapat dinilai dari nilai F-stat lebih besar dari F-tabel ( $117,607 > 2,61$ ). Hal tersebut menunjukkan variabel luas lahan dan tenaga kerja merupakan variabel yang mempengaruhi pendapatan petani di Desa Naga Saribu.

Koefisien determinan R squared ( $R^2$ ) = 0,864, artinya variasi variabel bebas luas lahan ( $X_1$ ), dan tenaga kerja ( $X_2$ ) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel pendapatan petani ( $Y$ ) sebesar 86,4% sedangkan sisanya sebesar 13,6% dijelaskan variabel lain tetapi tidak disertakan dalam model persamaan estimasi.

Secara parsial, luas lahan yang dimanfaatkan responden memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pengujian  $\alpha=5\%$  terhadap pendapatan petani, di mana nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{(2;40)}$  ( $2,942 > 1,684$ ). Dengan demikian hipotesis bahwa luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani di Desa Naga Saribu diterima.

Koefisien pada variabel  $X_1$  (luas lahan) sebesar 4736473. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan luas lahan yang dimanfaatkan seluas 1 hektar akan meningkatkan pendapatan petani sebesar Rp. 4.736.473.

Jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam pengelolaan lahan yang terkait dengan kegiatan optimasi lahan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pengujian  $\alpha=5\%$  terhadap pendapatan petani, di mana nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{(2;40)}$  ( $2,787 > 1,684$ ). Dengan demikian hipotesis bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan petani di Desa Naga Saribu diterima.

Koefisien pada variabel  $X_2$  (tenaga kerja) sebesar 61002,754 menunjukkan setiap peningkatan tenaga kerja yang digunakan sebesar 1 HOK akan meningkatkan pendapatan petani sebesar Rp. 61.002,754.

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi Pendapatan Petani di Desa Naga Saribu**

Variabel	Koefisien	t-hitung	Signifikan
Konstanta (a)	-8084.201	-0.005	0.996
Luas Lahan ( $X_1$ )	4736473	2,942	0,006
Tenaga Kerja ( $X_2$ )	61002,754	2,787	0,008
$R^2$	0,864		
t-tabel	1,684		
$F_{hitung}$	117,607		
$F_{tabel}$	2,61		

Menurut Soekartawi (2001), bahwa dalam melakukan usaha pertanian seorang pengusaha atau petani dapat memaksimalkan keuntungan dengan “*Profit Maximization dan Cost Minimization*”

### Analisis Dampak Optimasi Lahan terhadap Pengembangan Wilayah

Mengacu kepada keberhasilan pengembangan wilayah menurut Riyadi (2000), menyatakan bahwa ada 3 (tiga) indikator yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah yaitu produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan indikator tersebut dikaitkan dengan kegiatan optimasi lahan berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa:

- Produktivitas, diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta aparatnya. Mengacu kepada indikator tersebut, maka kegiatan optimasi lahan sebagai upaya memanfaatkan lahan terlantar menjadi lahan produktif dengan membudidayakan tanaman pertanian yang sesuai dengan kondisi wilayah, secara nyata mampu mengembangkan kemampuan pengurus kelompok tani maupun anggota kelompok tani dalam meningkatkan kegiatan pengelolaan lahan terlantar menjadi lahan produktif dengan budidaya tanaman pertanian jagung.
- Efisiensi, terkait dengan meningkatnya kemampuan teknologi atau sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks kegiatan optimasi lahan, yang diberikan oleh penyuluh pertanian secara nyata mampu meningkatkan kemampuan petani dalam penguasaan teknologi dan sistem pertanian khususnya budidaya tanaman jagung.

- Partisipasi Masyarakat, yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu wilayah. Kegiatan optimasi lahan yang dilakukan pemerintah hanya bersifat stimulan, artinya kegiatan ini hanya ditujukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan terlantar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat sendiri dengan lembaga yang ada di tengah masyarakat menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan tersebut.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa setelah adanya kegiatan optimasi lahan, masyarakat mempunyai kemauan untuk mengembangkan sendiri kemampuannya dalam memanfaatkan lahan terlantar, serta terbentuknya lembaga penunjang kegiatan seperti kelompok tani baru sebagai wadah bagi petani dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian di nagori.

Bentuk pengembangan aspek lain dengan adanya kegiatan optimasi lahan tersebut adalah peningkatan sarana dan prasarana transportasi dengan pembangunan jalan yang diintegrasikan dengan program lain yang bersamaan dilaksanakan di Desa Naga Saribu. Pembangunan jalan ke setiap sentra lahan pertanian yang dikelola dalam kegiatan optimasi lahan adalah jalan usaha tani dengan lebar badan jalan sesuai dengan kebutuhan transportasi petani.

Kegiatan optimasi lahan di Desa Naga Saribu dikaitkan dengan agenda pengembangan agroindustri perdesaan, belum sepenuhnya terlaksana, karena hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan adalah pengembangan infrastruktur penunjang, khususnya listrik dan akses jalan, serta peningkatan mutu produksi jagung, sedangkan penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian dan aspek penunjang lainnya belum terlaksana.

Pengembangan industri yang berbasis pertanian (Indrawan, 2000), maka peningkatan produksi jagung setelah kegiatan optimasi lahan di Desa Naga Saribu ternyata belum memberikan nilai tambah yang cukup

bagi petani, karena sampai saat ini petani masih menjual hasil pertanian jagunya dalam bentuk mentah (jagung pililan). Oleh karena itu perlu diupayakan pembangunan pabrik pengolahan jagung di Desa Naga Saribu sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih layak bagi petani.

Peningkatan luas lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman jagung tentunya membutuhkan tenaga kerja. Standar kebutuhan tenaga kerja untuk usahatani jagung (Syaifuddin, 2006) adalah sebanyak 40 HOK/hektar untuk kegiatan penyiapan lahan, penanaman, penyangan, pemupukan, pemanenan, pengeringan serta pemipilan jagung. Dengan luas lahan rata-rata 2.4 hektar setiap petani, maka kebutuhan tenaga kerja adalah 96 orang setiap petani. Hal ini menunjukkan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat di Nagori/Desa Naga Saribu maupun dari luar.

#### KESIMPULAN

1. Terdapat perbedaan luas lahan yang dimanfaatkan sebelum dan setelah kegiatan optimasi lahan di Desa Naga Saribu, rata-rata sebesar 1,4 hektar setiap petani sebelum kegiatan menjadi 2,4 hektar setiap petani setelah kegiatan optimasi lahan.
2. Terdapat perbedaan tenaga kerja yang digunakan sebelum dan setelah kegiatan optimasi lahan di Desa Naga Saribu, rata-rata sebesar 66 HOK/rata-rata luas lahan setiap petani sebelum menjadi 173 HOK/rata-rata luas lahan setiap petani setelah kegiatan optimasi lahan.
3. Terdapat perbedaan pendapatan petani sebelum dan setelah kegiatan optimasi lahan di Desa Naga Saribu, rata-rata sebesar Rp.16.117.998/tahun setiap petani sebelum menjadi Rp.21.883.895/tahun setiap petani setelah kegiatan optimasi lahan.
4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel luas lahan dan tenaga kerja terhadap pendapatan petani setelah kegiatan optimasi lahan di Desa Naga Saribu. Peningkatan pendapatan petani dengan adanya penggunaan luas lahan dan tenaga kerja dalam kegiatan optimasi lahan merupakan indikator keberhasilan pengembangan wilayah dari indikator produktivitas, efisiensi serta kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

#### SARAN

1. Program kegiatan optimasi lahan perlu ditingkatkan untuk pengadaan bibit dan sarana produksi serta pengembangan komoditi pada lokasi yang lain, karena kegiatan ini mampu meningkatkan pemanfaatan lahan terlantar, kesempatan kerja serta peningkatan petani. Mengingat kegiatan ini bersifat stimulan, maka diharapkan peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat sehingga di masa datang masyarakat dapat melakukan pengelolaan lahan terlantar secara mandiri.
2. Peningkatan produksi jagung melalui kegiatan optimasi lahan dapat mendukung pengembangan industri yang berbasis pertanian, dan merupakan andalan potensial untuk membangkitkan dinamika ekonomi masyarakat. Karena itu perlu pengembangan industri hilir untuk pengolahan hasil pertanian, khususnya industri pengolahan jagung di sentra produksi seperti Nagori/Desa Naga Saribu untuk memberikan nilai tambah (*added value*) bagi petani.
3. Perlu dikembangkan untuk mengaplikasikan model tripartite yang menggabungkan bisnis antara kelompok tani, swasta dan perbankan. Usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas petani

#### DAFTAR RUJUKAN

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Simalungun, 2007, *Road Map Pengembangan Komoditi Unggulan Jagung Kabupaten Simalungun*, Pematangsiantar.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, 2006, *Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Tahun 2006*, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Indrawan, R, 2000, *Evaluasi dan Kontribusi Terhadap Program Kredit Usaha Tani*, Lembaga Penelitian Unpas, Komisi Litbangda Prop. Jabar, ISEI Jawa Barat.
- Nagori Naga Saribu, 2008. *Monografi Nagori Naga Saribu, Tahun 2008*.
- Pamatang Silima Huta, 2008. *Kecamatan Pamatang Silima Huta Dalam Angka, Tahun 2008*.



Riyadi, D.M.M, 2000, *Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah*, Makalah pada acara Diseminasi dan Diskusi Program Pengembangan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah, Bogor.

Sudjana, 1984, *Metoda Statistika*, Tarsito, Bandung.

Soekartawi, 1986, *Ilmu Usahatani Untuk Pemeliharaan dan Pengembangan Petani Kecil*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Syaifuddin, 2006, *Optimalisasi Penggunaan Lahan Menunjang Pengembangan Tanaman Jagung di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar*, STTP Gowa, Sulawesi Selatan.

# **PENGARUH KEBERADAAN PT. PMKS (PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT) TALIKUMAIN TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus: Desa Talikumain, Kecamatan Tambusai)**

**Hayatul Muchni**

Alumnus S2 PWD SPs USU

***Abstract:** This research aim at analyzing the impact of PT PMKS on the development of region around industrial zoe; the contribution of PT PMKS to society, also to know how the people perception about the industrial existance. The research result show that; people income significantly distinc before and after the existent of PT PMKS. Based on the social income growth calculation of Kabupaten Rikan Hulu, we could see that regional incme percapita growth is 3,4%, while the income percapita growth of the people much higher than that percapita regional.*

***Keywords:** contribution of PT PMKS on regional development*

## **PENDAHULUAN**

Proses pembangunan industri diharapkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi untuk kebutuhan di dalam negeri dan luar negeri serta kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi industri menuju taraf hidup yang lebih baik. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan usaha informal.

Pembangunan sektor industri ditujukan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, serta memperluas dan meratakan kesempatan kerja Menurut Matias Siagian (1994)

Dalam rangka pengembangan perekonomian wilayah sekaligus peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, Pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten Rokan Hulu berupaya mengundang investor untuk mengolah potensi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yang dapat digunakan para investor. Salah satu investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Rokan Hulu adalah PT. PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) yang bergerak dalam pengembangan agroindustri berupa pabrik pengolahan kelapa sawit.

Kehadiran aktivitas agroindustri ini diharapkan antara lain membuka lapangan

kerja baru dan meningkatkan *multiplier effect*. Meningkatnya *multiplier effect* terjadi dengan munculnya aktivitas-aktivitas perekonomian baru bagi masyarakat sekitarnya. Harapan terjadinya peningkatan sosial ekonomi masyarakat sebagai akibat kehadiran aktivitas perekonomian ini tidak terlepas dari dua faktor, yaitu sejauh mana kesempatan yang diberikan perusahaan tersebut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan sejauh mana kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian baru tersebut.

Selain perubahan pendapatan, kehadiran PT PMKS diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Perubahan lahan yang sebelumnya sebagai kawasan pertanian dan hutan menjadi kawasan industri yang akan mempengaruhi jenis sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat.

Lokasi industri tersebar hampir merata di Kabupaten Rokan Hulu dan sebagian terkonsentrasi di sepanjang jalan lintas Riau-Sumatera utara. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan jalur lintas arteri primer Riau-Sumatera Utara, dimana letak industri dalam penelitian ini berada di daerah pedesaan relatif jauh dari fasilitas perkotaan (*rural location based industry*).

Pengaruh adanya industri dapat dilihat dari terjadinya perubahan yang bersifat fisik berupa dibangunnya jalan dan infrastruktur

untuk memudahkan transportasi pengangkutan bahan baku maupun pengangkutan hasil industri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi industri tersebut kepada masyarakat pedesaan disekitar industri. Laba industri selain di potong pajak dan retribusi kepada pemerintahan (daerah) juga dapat berpartisipasi kepada pembangunan desa setempat. Besar kecilnya kepedulian industri tersebut terhadap desa sekitarnya tentunya akan menimbulkan juga terhadap besar kecilnya persepsi penerimaan masyarakat terhadap keberadaan operasionalisasi industri tersebut di desanya.

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai kebijaksanaan Tata Ruang Daerah menyangkut daerah perkotaan dan perdesaan yang salah satu isinya: daerah perdesaan pengembangannya diarahkan sebagai pusat produksi, penyediaan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri dan daerah penyangga lingkungan hidup. Dengan demikian perlu pengendalian penggunaan tanah pertanian subur dengan kepentingan non pertanian, termasuk penyelamatan, pelestarian dan peningkatan kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari beroperasinya industri tersebut: 1) bagaimanakah pengaruh kehadiran PT PMKS terhadap pengembangan wilayah di sekitar kawasan industri tersebut, 2) bagaimanakah persepsi masyarakat di sekitar pabrik terhadap keberadaan industri di daerah perdesaan?

## METODE

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai. Kecamatan Tambusai merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas wilayah Kecamatan Tambusai  $\pm 1.127,5 \text{ Km}^2$  atau 112.750 Ha, mempunyai 10 desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Dalu-Dalu. Pada tahun 2007 kecamatan Tambusai mempunyai penduduk sebanyak 41.842 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 37 jiwa/ $\text{Km}^2$ . Dari Lokasi Penelitian di Kecamatan Tambusai dipilih 1 (satu Desa), yang terdiri dari 3 (Tiga Dusun). Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Talikumain dengan jumlah sampel 40 Kepala Keluarga (KK). Di

dalam penelitian ini, penentuan sampel digunakan secara proporsional random sampling. Maka jumlah Sampel masyarakat adalah 39,2 rumah tangga (KK) ( $\pm 10\%$  dari 392 rumah tangga populasi). Jumlah sampel dibulatkan menjadi 40 sampel.

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yang diukur yaitu pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, sumber bahan baku, kontribusi terhadap PEMDA, kepedulian terhadap masyarakat dan sikap masyarakat. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah: untuk mengetahui dampak pembangunan industri terhadap peningkatan pendapatan dan pengembangan wilayah di desa Talikumain dilakukan dengan uji beda (Uji-t) yang dibantu dengan Program Komputer SPSS For Windows ver. 12.00. Dan untuk menghitung laju pertumbuhan pendapatan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita (pendapatan regional) digunakan rumus:

$$Pt = P0(1+r)^n \rightarrow \frac{Pt}{P0} = (1+r)^n \rightarrow \log \frac{Pt}{P0} = n \log(1+r)$$

$$\rightarrow \frac{\log \frac{Pt}{P0}}{n} = \log(1+r)$$

## HASIL

### 1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara  $100^0-101^0 52'$  Bujur Timur dan  $0^0 - 1^0 30'$  Lintang Utara. Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 14 kecamatan mempunyai luas wilayah  $7.449,85 \text{ km}^2$ ). Pada daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun dan Kecamatan Ujung Batu belum dapat ditentukan luas sebenarnya, tetapi bila disesuaikan dengan total luas dari Kabupaten Rokan Hulu, maka luas dari 3 (tiga) kecamatan tersebut adalah  $1.132,12 \text{ Km}^2$  (15,20%). Dua kecamatan yang baru, yaitu Kecamatan Bonai Darusalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darusalam merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kunto Darusalam. Luas dari 2 (dua) kecamatan tersebut belum dapat diketahui pasti, tetapi bila merujuk dari kecamatan asalnya (kecamatan Kunto Darusalam) maka ketiga kecamatan tersebut mempunyai luas  $1.432,87 \text{ Km}^2$  atau 19,23%.

Jarak ibu kota Kabupaten Rokan Hulu ke ibukota Provinsi Riau adalah 176 Km, sedangkan jarak dengan pelabuhan laut terdekat, yaitu kota Dumai adalah sekitar 135 km. Pada masa ini sedang dilakukan peningkatan jalan untuk ruas jalan kota lama – Sontang. Ruas jalan tersebut akan melalui kota duri, sehingga akan mempersingkat jarak tempuh ke Kota Dumai. Bila jalan tersebut terealisasi maka transportasi darat yang akan menuju ke Kota Dumai akan beralih ke ruas jalan ini dan tidak melalui kabupaten kampar lagi.

## 2. PT. PMKS Talikumain

PT. PMKS adalah salah satu group perusahaan swasta nasional. Karena Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Rokan Hulu memiliki prospek yang baik sebagai areal pengembangan perkebunan kelapa sawit, timbullah gagasan untuk mendirikan pabrik minyak kelapa sawit, yang kemudian diberi nama PT. PMKS Talikumain (Pabrik minyak kelapa sawit), pabrik ini berlokasi di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai.

PT. PMKS berkantor pusat di Jakarta jalan Cik Ditiro Menteng Jakarta Pusat. Pabrik minyak kelapa sawit ini berlokasi di wilayah Kecamatan Tambusai, dibangun di atas lahan seluas 30 Ha, termasuk lahan pemukiman sebagian karyawan.

Fungsi lahan sebelum PT.PMKS berdiri merupakan tanah pertanian tegalan yang sudah tidak produktif lagi karena tidak subur yang dimiliki oleh beberapa perorangan/petani yang dibeli dengan harga yang wajar dengan luas  $\pm$  30 Ha. pada akhir tahun  $\pm$ 1997. Pembelian tanah dilakukan secara bertahap bekerjasama dengan aparat Desa Talikumain yang segala perijinannya telah disetujui oleh Pemerintah Propinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu sejalan dengan pematangan tanah selama  $\pm$  1 tahun untuk dapat menyokong bangunan industri yang akan dibangun nantinya, dan bila dilihat dari faktor-faktor pemilihan lokasi, industri pengolahan minyak kelapa sawit bukan berorientasi ke daerah pemasaran melainkan ke daerah bahan baku karena lebih dekat dari lokasi pabrik.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh PT. PMKS terhadap Pendapatan Masyarakat

Perubahan pendapatan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pendapatan masyarakat tahun 2004 (sebelum PT.PMKS berdiri) dan tahun 2008 (saat penelitian). Perbedaan pendapatan dianalisis dengan uji beda rata-rata (uji t), perhitungan uji beda rata-rata di gunakan data harga konstan atas dasar tahun 2004.

**Tabel 1. Uji Statistik Sampel Berpasangan**

		Rata-rata	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pendapatan	Sebelum	2351250.0	40	2746454.2993	434252.55
	Sesudah	3103576.7	40	3218976.4883	508964.87

Tabel 1 menunjukkan pendapatan rumah tangga masyarakat Desa Talikumain sebelum berdirinya PT.PMKS, menghasilkan rata-rata Rp 2.351.250/bulan,-. Sedangkan setelah berdirinya PT. PMKS Pendapatan rumah tangga masyarakat Desa Talikumain meningkat dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp 3.103.576,7/bulan,-.

### 2. Pengaruh PT. PMKS terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja di PT.PMKS Talikumain berjumlah 138 tenaga kerja, 70% dari total tenaga kerja tersebut berasal dari masyarakat Desa Talikumain. Jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaannya adalah 138 orang.

### 3. Pasar Hasil Produksi Perkebunan Rakyat

Kapasitas Produksi PT.PMKS untuk mengolah kelapa sawit menjadi CPO berjumlah 600 Ton/hari, yang asal bahan bakunya dari masyarakat Talikumain dan juga dari 10 desa di Kecamatan Tambusai tersebut. Sumber bahan bakunya adalah Minyak kelapa sawit berasal dari buah tumbuhan tersebut, yang satu tandannya bisa mempunyai berat sekitar 40-50 kg. Seratus kilogram dari bibit minyak ini bisa menghasilkan sekitar 20 kg minyak. Satu hektar kelapa sawit dapat menghasilkan 5.000 kg minyak mentah, atau hampir 6.000 liter minyak mentah. Produksi minyak kelapa sawit ditargetkan 20 - 25 ton/tandan buah

segar/Ha/tahun atau 4 - 5 ton/ha minyak kelapa sawit. Orientasi pemasaran hasil produksi luar dan dalam negeri, dengan tempat pemasaran yaitu PHS dan BKR (Bukit kapur exsa- Dumai).

#### 4. Kontribusi terhadap PEMDA

Selain dari Pajak yang telah diberikan oleh PT.PMKS terhadap PEMDA, PT.PMKS juga telah membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Rokan Hulu.

#### 5. Kontribusi terhadap Masyarakat

Kepedulian pabrik terhadap lingkungan sekitar sangat diperlukan pabrik untuk menjaga kestabilan keamanan lingkungan dan menjaga kontinuitas produksi dan nama baik pabrik pada pihak lain. Adapun bentuk-bentuk kontribusi pabrik yang telah diberikan, yaitu:

- a. Pemberian bantuan pembangunan masjid
- b. Membangun jalan jembatan
- c. Memberi santunan kepada Fakir Miskin
- d. Pembinaan Olahraga di Desa Talikumain
- e. Pemberian bantuan dana partisipasi pada Hari Kemerdekaan RI.

Dengan adanya kontribusi PT.PMKS terhadap berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, maka PT.PMKS umumnya dapat diterima oleh masyarakat.

#### 6. Pengelolaan Limbah

Di dalam menghasilkan suatu produk yang dihasilkan oleh industri tentu mempunyai sisa hasil produksi yang tidak terpakai yang biasa disebut limbah/polusi yang dihasilkan pabrik. Polusi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar pabrik berupa suara bising yang merupakan bunyi dari bekerjanya mesin-mesin pabrik yang berukuran besar ketika mengolah kelapa sawit menjadi minyak yang dihasilkan serta terkadang keluarnya asap hitam dari cerobong asap pabrik ketika memproses daur ulang sisa produksi yang tidak terpakai lagi.

Pihak pabrik telah berusaha mengurangi suara bising yang ada walaupun tidak bisa 100% menghilangkan suara bising tersebut dengan mempergunakan peredam suara getar yang ada di dalam pabrik. Sedangkan untuk asap hitam telah

dusahakan dengan memindahkan proses pendaur-ulangan limbah yang tidak terpakai ke tempat lain atau sebagian lagi langsung dijual kepada pihak yang membutuhkannya.

#### 7. Perubahan Penggunaan Lahan

Menurut Sandy (1960), perubahan penggunaan lahan dapat saja terjadi apabila adanya perubahan/perbedaan nilai fungsi lahan sebelumnya dan sesudahnya yang bernilai ekonomi lebih tinggi dari sebelumnya. Salah satu pendorongnya adalah peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan lainnya dapat menimbulkan perubahan dalam penggunaan lahan. Biar bagaimanapun keputusan pemanfaatan lahan yang ada harus dapat diperbuat demi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dan wilayah. Hal inilah yang mendasari pendirian pabrik PT PMKS di Desa Talikumain mengingat lahan sebelum pabrik berdiri merupakan lahan tidur yang kurang produktif dibandingkan dengan nilai produk dan *multiplier effect* yang akan ditimbulkan apabila pabrik berdiri nantinya terhadap wilayah sekitar.

#### 8. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap PT. PMKS

Berdasarkan hasil observasi dan analisis data-data yang ada dapat diketahui secara umum masyarakat yang ada disekitar pabrik masih menerima keberadaan pabrik disekitar tempat tinggal mereka.

**Tabel 2. Persentase Sikap masyarakat terhadap keberadaan PT.PMKS**

No	Kategori	Jumlah	Persentase%
1	Positif	29	74
2	Negatif	11	26
Jumlah		40	100

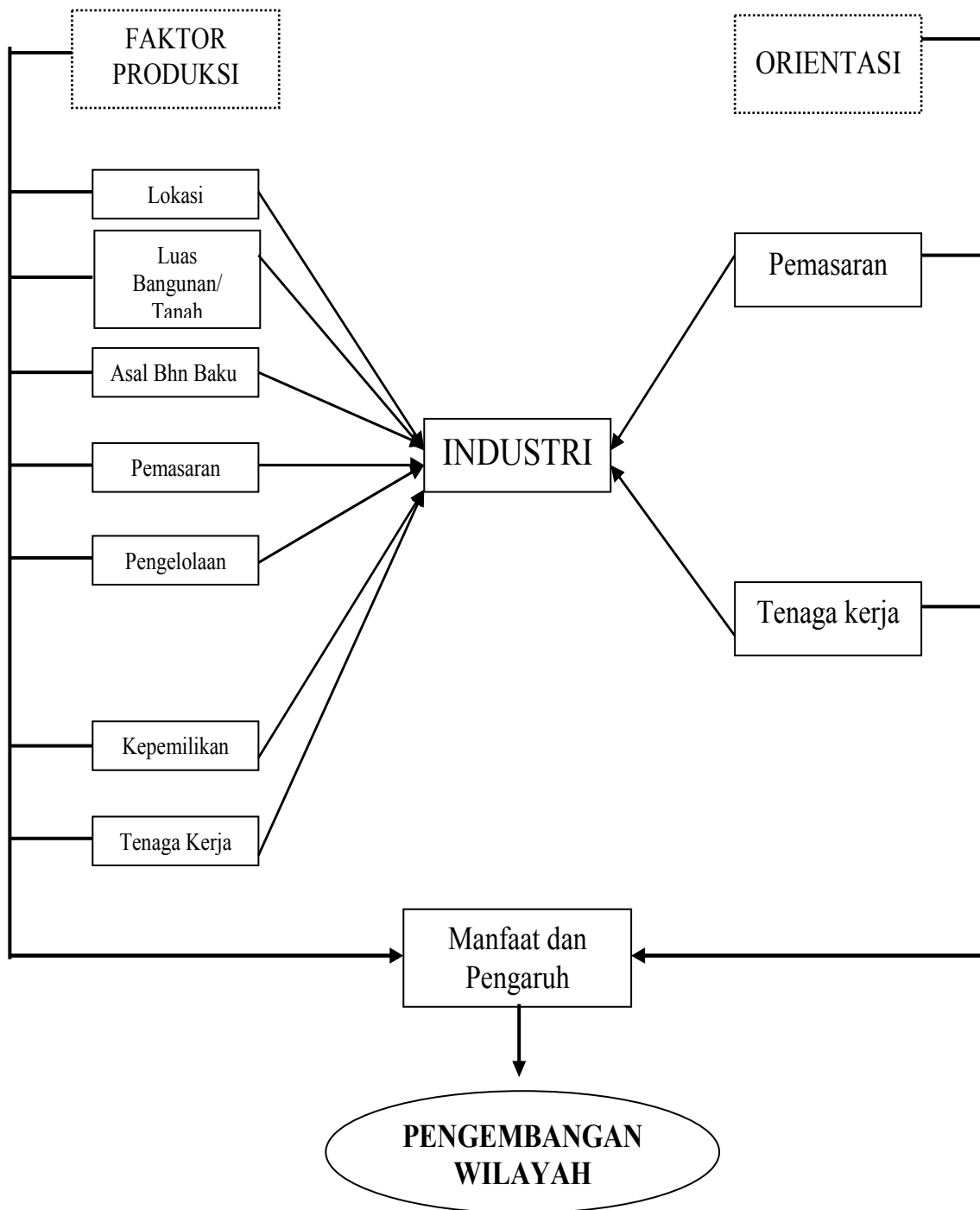
Sumber: data diolah

#### 9. Implikasi Spasial

Dengan adanya industri di wilayah perdesaan diharapkan dapat mengembangkan pembangunan desa disekitarnya. Menurut hasil survei di lapangan ditemukan bangunan rumah yang bertambah fungsi selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat usaha untuk menambah pendapatan keluarga sebagai dampak dari adanya interaksi para pekerja pabrik yang dari luar desa

Talikumain langsung maupun tidak langsung untuk membeli sarapan, makan siang dan membeli makanan ringan/rokok. Perkembangan jumlah bangunan 4 tahun terakhir yang terdiri dari: rumah/warung makan 4 buah; warung makanan ringan 9 buah; kios/bengkel 4 buah; Kios Jahit 1 buah; pangkalan ojek 1 buah.

Sedangkan bangunan rumah yang bertambah dalam 5 tahun terakhir ini ada sekitar 4 rumah baru yang terletak di jalan Lintas Sumatera menurut informasi dari kepala Desa pembangunan rumah baru tersebut tidak berhubungan dengan keberadaan pabrik PT PMKS, melainkan karena inisiatif sendiri.



## KESIMPULAN

Dari hasil pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kehadiran industri PT. PMKS berpengaruh terhadap pengembangan wilayah dalam bentuk:
  - a. Peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pabrik PT.PMKS berbeda nyata. Dimana pendapatan masyarakat sesudah adanya PT.PMKS lebih tinggi.
  - b. Tenaga kerja di PT.PMKS Talikumain berjumlah 130 orang, 70% diantaranya berasal dari masyarakat Desa Talikumain
  - c. PT.PMKS memperlancar pemasaran komoditi yang dihasilkan masyarakat Kecamatan Tambusai.
  - d. PT.PMKS memberi kontribusi kepada PEMDA berupa pembayaran pajak, dan juga PT. PMKS telah membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Rokan Hulu
2. Persepsi Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan PT.PMKS adalah positif.

## SARAN

Tidak semua lapisan masyarakat merasakan pengaruh positif terhadap keberadaan sosial kehidupan ekonomi mereka. Untuk itu jika memang PT.PMKS ini akan dipertahankan, perlu dilakukan kebijakan baru berupa *community development program* yang didasarkan *political will* yang berpihak pada masyarakat, bukan pendekatan *security* sebagai upaya keamanan operasional. Kebijakan baru ini dapat berupa pemberian kompensasi melalui bantuan yang dapat meningkatkan sosial ekonomi mereka, seperti:

1. Bantuan alat produksi pertanian sehingga terjadi peningkatan produksi dan produktivitas.
2. Memberi peluang yang lebih besar bagi masyarakat setempat alam mengembangkan usaha yang terkait langsung dengan kebutuhan para karyawan PT.PMKS, dengan cara menghapus isolasi kompleks pabrik dengan masyarakat.

3. Memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat setempat untuk menjadi karyawan handal melalui peningkatan kualitas sumber daya generasi muda daerah dengan bantuan biaya pendidikan, misalnya: pemberian beasiswa penuh (uang kuliah dan biaya hidup) bagi anak daerah yang berprestasi, misalnya: yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri untuk program studi yang paling dibutuhkan perusahaan, seperti program studi kimia (kebutuhan pabrik), Pertanian, maupun ekonomi (kebutuhan administrasi), kesejahteraan sosial, sehingga anak daerah menjadi tenaga *skill* dan berpeluang menduduki posisi memadai pada struktur organisasi perusahaan, sekaligus berpeluang dalam mencapai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Jadi jangan mayoritas anak daerah sebagai buruh kasar, termasuk tukang cuci di mess karyawan dan tamu.
4. Secara berkala (melalui kerja sama dengan lembaga yang berkompeten) melaksanakan penelitian tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan hidup, termasuk kesehatan, dan hasilnya ditindaklanjuti dengan upaya meminimalkan dampak negatif industri pengolahan minyak kelapa sawit tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azwar, S, 1995. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian*, Penerbit Reineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Sritua. 1993, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia.
- Bappeda Kabupaten Rokan Hulu, *Ringkasan Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan Tambusai 2002*, Kabupaten Rokan Hulu.
- BPS dan Bappeda, *Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2006*, Kabupaten Rokan Hulu.
- BPS, *Provinsi Riau Figures 2007*, Provinsi Riau.

- Bryan, Coralie dan White, Louise G.1989, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3S Jakarta.
- Echols, John M. dan Shadiliy, Hasan, 1992, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Hastono, Sutanto Priyo. 2001, *Modul Analisis Data*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1984, *Masyarakat Desa di Indonesia*, LPFE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kristanto, Philip,2004, *Ekologi Industri*, PT,Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Murti, Bhisma, 2006, *Desain dan ukuran sample untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2002, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, PT, Rineka Cipta, Jakarta.
- Satria, 2003, *Konteks sosio-spatial industri kekotaan yang berlokasi di pedesaan*, Tesis MPKD-UGM.
- Siagian, Matias. 1997, *Pengaruh Perusahaan besar terhadap kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat*, Tesis PWD-USU.
- Singarimbun, Masri, dan S. Effendi. 1995, *Metode Penelitian Survai*, Cetakan Kedua Revisi, Jakarta, LP3S.
- Tarigan, Robinson. 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2007, *Ekonomi Regional*, PT, Bumi Aksara, Jakarta.
- Supriana, Tavi. 1995, *Keterkaitan Sektor Pertanian, Agroindustri dan Sektor Ekonomi Lain dalam Pengembangan Wilayah*, Tesis PWD-USU.



# PENGARUH PROGRAM SEMAI BENIH BANGSA TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH PEDESAAN DI KABUPATEN ACEH UTARA

**Irfansyah I.S.**

Alumnus S2 PWD SPs USU

***Abstract:** This research background is besides careful of good condition at global storey; level, local problems and national of society where children in natural Sub-Province Aceh North of trauma condition effect of armed conflict and hardness. As effort taken is with execution of Program Plant Seed Nation which have been developed by since year 2003 till now (2008). This research method is descriptive method of different test and analysis of mean of t-test. Data the used is primary data and data of scunder. Primary data obtained propagated quesioner at 2 (two responsder group) that is teacher and society which have got Program Plant Seed Nation, and interview with source - related/relevant source and also perception of field. data of scunder obtained from related/relevant institutions. In general perception of teacher and society to execution of activity of Program Plant Seed Nation have good. But that way society wish development of building learn permanent with medium addition of prasarana supporter of building. Hereinafter there are difference of earnings of mean before and after becoming teacher at Program Plant Seed Nation (SBB)..*

***Keywords:** program plant seed nation and development of region*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan memiliki peran berarti bagi pembentukan suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan yang dinikmati oleh penduduk di satu negara mampu mewujudkan terjadinya perubahan di berbagai sendi kehidupan masyarakat. Proses pendidikan mengajarkan peserta didiknya untuk memahami dan menguasai ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam penguasaan teknologi. Banyak negara-negara maju didunia yang merasakan pentingnya pendidikan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti kalangan terpelajar yang mampu melakukan penemuan-penemuan semakin banyak sehingga penemuan-penemuan itu (inovasi) dapat dijual kepada konsumen di seluruh dunia dalam wujud barang dan jasa.

Beban berat seperti ini sangat dirasakan oleh pemerintah Indonesia sehingga alokasi dana untuk sektor-sektor penting dalam pembentukan bangsa Indonesia terutama pada sektor pendidikan semakin berkurang. Dalam anggaran pengeluaran dan belanja negara (APBN) 2007 alokasi dana untuk sektor pendidikan di semua jenjang pendidikan adalah Rp. 44,5 triliun, sementara dalam APBN tahun 2008 alokasi dana yang tersedia untuk pendidikan

hanyalah Rp. 42 triliun. Penurunan alokasi dana seperti ini secara langsung membawa pengaruh besar dalam melaksanakan program-program pendidikan skala nasional. Ini berarti banyak aktivitas pendidikan yang terpaksa dipangkas dan berarti juga mengurangi kesempatan anak-anak usia sekolah (6-19 tahun) menjadi terkendala.

Penurunan alokasi dana memberi pengaruh langsung kepada anak usia sekolah di seluruh Indonesia untuk mengecap pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi terutama saat para lulusan itu memasuki pasaran kerja yang menginginkan calon tenaga kerja dengan tingkat keterampilan dan penegetahuan tinggi. Inilah beberapa kendala yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia, padahal di dalam era global saat ini pemilikan pendidikan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi semakin diperlukan. Sementara di banyak kawasan Indonesia yang relatif terpencil kesempatan warganya untuk mendapatkan pendidikan pastilah tidak terpenuhi. Apalagi sejak kawasan provinsi Aceh, Sumatera Utara (Nias) dilanda gempa dan tsunami pada tahun 2004, berbagai peristiwa bencana (alam) dan beragam aksi teror yang menurunkan citra Indonesia

dimata dunia membuat perhatian pemerintah semakin tersita termasuk perhatian untuk membenahi kerusakan prasarana pendidikan.

Bahkan dalam sebuah wawancara *Fukuyama* mengatakan modal terpenting dalam memenangkan kompetisi global, kompetisi yang akan dihadapi pada masa mendatang adalah modal kepercayaan (*trust*). Perubahan kultural akan menjadi penentu utama keberhasilan bangsa, modal sosial diwujudkan dalam bentuk kepercayaan akan menjadi sama pentingnya dengan modal fisik. Hanya masyarakat dengan kepercayaan sosial yang tinggi yang akan mampu menciptakan organisasi bisnis skala besar yang fleksibel yang diperlukan untuk berhasil dalam kompetisi perkonomian global yang berkembang sekarang. (Kompas, 10 Agustus 1997).

Menurut Miraza (2008) suatu masyarakat harus dibangun bukan dimulai dari sudut kesejahteraan materi, tetapi kemandirian, keahlian dan keterampilan. Masyarakat tidak harus dihindari dari kemiskinan tetapi dari kebodohan. Masalah utama masyarakat terbelakang adalah kebodohan. Oleh sebab itu, maka kebodohanlah yang harus dihindarkan. Masyarakat yang terhindar dari kebodohan secara langsung akan terhindar dari kemiskinan dan kemelaratan. Oleh karena itu, bangunlah pendidikan yang sebenarnya pendidikan, tidak sekedar kosmetik belaka.

Menurut Surya (2007), merosotnya moralitas bangsa nampak dalam semua sendi kehidupan masyarakat Indonesia seperti respons, prestise, kepercayaan, sikap, nilai-nilai yang berubah serta perilaku yang tidak lagi menimbang kaedah-kaedah agama dan norma-norma yang berlaku. Kecenderungannya adalah tidak ada lagi kesungguhan melaksanakan etika yang mampu mengendalikan individu memisahkan antara perbuatan baik-buruk, halal-haram, patuh-memandel, tertib-semrawut, bahkan kaedah-kaedah agamapun cenderung diabaikan. Sikap irrasional boleh jadi lebih dominan daripada sikap rasional, sehingga apapun perbuatan yang menguntungkan secara ekonomis patut dijalankan tanpa rasa berdosa.

Hal tersebut perlu disyukuri dengan cara memanfaatkan kebebasan dalam pengelolaan dana untuk sebesar-besarnya

pada kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana menyusun prioritas penggunaan anggaran yang didasarkan pada keinginan rakyat Aceh sekarang dan di masa yang akan datang. Hal terpenting yang harus disadari adalah bagaimana pembangunan modal sosial (*social capital*) sebagai kunci utama bagi pembangunan berkelanjutan di Nanggroe Aceh Darussalam (Jalil, 2006).

Sebagai wujud dari tanggung jawab Undang-undang, pada tahun 2003 Indonesia Heritage Foundation (IHF), sebuah Yayasan Badan Wakaf Warisan Nilai Luhur Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Exxon Mobil Oil melakukan kerja sama dalam mengembangkan Program Semai Benih Bangsa (SBB). Hingga periode 2003 – 2008 telah terbangun lebih 113 Unit/lokasi SBB yang menggunakan meunasah-meunasah (*musholla*) di 22 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

Program Semai Benih Bangsa (SBB) bertujuan memberikan pembelajaran terpadu yang berbasis karakter kepada anak-anak usia dini dengan metode pembelajaran mengintegrasikan kemampuan kognitif anak dan emosi sehingga anak-anak didik diharapkan dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah respons masyarakat dan guru terhadap Program Semai Benih Bangsa (SBB) dikaitkan dengan pengembangan wilayah dalam upaya peningkatan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Aceh Utara?, Bagaimana pengaruh pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa (SBB) dalam pembentukan karakter masyarakat yang merupakan salah satu pilar pengembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Aceh Utara?, Apakah terdapat perbedaan pendapatan rata-rata sebelum dan sesudah menjadi guru pada Program Semai Benih Bangsa (SBB) di Kabupaten Aceh Utara?

## METODE

### 1. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup wilayah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah 18 (delapan belas) desa dalam 6 (enam) kecamatan dengan dasar pembagian menurut wilayah,

yaitu wilayah timur 2 (dua) kecamatan, wilayah tengah 2 (dua) kecamatan dan wilayah barat 2 (dua) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya sampel ditentukan berdasarkan pembagian jumlah penduduk dengan kategori besar, sedang, dan kecil.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang berisi daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan observasi langsung kelapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dari berbagai informasi atau instansi terkait yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian, yaitu: Biro Pusat Statistik (BPS), Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Kantor Camat, Kantor Desa, serta hasil penelitian terdahulu dan literatur yang dianggap relevan dalam mendukung penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara yang telah menerima program semai benih bangsa yang terbagi dalam 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Jambo Aye dengan jumlah penduduk 38.928 jiwa, Kecamatan Lhoksukon dengan jumlah penduduk 42.937 jiwa (mewakili wilayah timur), Kecamatan Samudera dengan jumlah penduduk 21.880 jiwa, Kecamatan Syamtalira Bayu 21.806 jiwa (mewakili wilayah tengah), kecamatan Dewantara dengan jumlah penduduk 43.998 jiwa dan kecamatan Nisam dengan jumlah penduduk 34.500 jiwa (mewakili wilayah barat) pada tahun 2006.

## 4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, sampel ditetapkan sebanyak 54 kepala keluarga dan 36 guru dari ketiga wilayah penelitian (timur, tengah, barat). Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*).

## 5. Metode Analisa Data

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan metode deskriptif yaitu mendeskriptifkan persepsi masyarakat dan guru terhadap aspek sosial, ekonomi, infrastruktur dan kelembagaan selama Program Semai Benih Bangsa berlangsung melalui tabel distribusi persepsi yaitu berdasarkan skala dengan mengkatagorikan yaitu  $a = 4$ ,  $b = 3$ ,  $c = 1$  dan  $d = 0$  pada setiap pilihan jawaban yang diberikan. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan kedua dilakukan analisis dengan uji beda parametrik uji-t (*t-test*) yaitu melihat semai benih bangsa ini terhadap peningkatan pendapatan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan uji beda (Uji-t) yang dibantu dengan Program Komputer SPSS *For Windows ver. 12.00*.

## HASIL

### 1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara (*North Aceh Regency*) sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terletak di bagian pantai pesisir utara pada  $96.52.00^\circ - 97.31.00^\circ$  Bujur Timur dan  $04.46.00^\circ - 05.00.40^\circ$  Lintang Utara. Sebelum tahun 1999, Kabupaten Aceh Utara memiliki wilayah yang relatif luas, mengingat pada masa itu Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe masih termasuk sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Namun setelah terjadi pemekaran, luas wilayah kabupaten yang sebelumnya menjadi induk Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe ini tinggal 329.686 hektar atau 3.296,86 kilometer persegi. Luas wilayah Aceh Utara terbagi ke dalam 22 wilayah kecamatan.

Dari 22 kecamatan yang ada, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Sawang, dan Kecamatan Syamtalira Bayu adalah wilayah terluas. Selain itu kecamatan-kecamatan lain yang tergolong luas wilayahnya adalah Kecamatan Nisam, Lhoksukon, Meurah Mulia, Cot Girek, Tanah Jambo Aye, Baktiya, Kuta Makmur, Langkahan, Matangkuli dan Kecamatan Seunuddon. Sedangkan delapan kecamatan lainnya hanya memiliki luas kurang dari 100 km<sup>2</sup> dan rata-rata di bawah 50 km<sup>2</sup>.

Hingga akhir tahun 2006 Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah penduduk 502.228 jiwa yang tersebar di 22 kecamatan dan 852 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk per rumah tangga sebesar 110.108 dan rata-rata penduduk 152 jiwa/Km. Tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok umur yang terbesar jumlahnya adalah pada usia 15-19 tahun dengan jumlah 61,616 jiwa. Selain itu kelompok usia yang tergolong besar adalah usia 10-14 tahun dengan jumlah 60,770 jiwa, usia 5-9 tahun dengan jumlah 60,338 jiwa dan usia 0-4 tahun dengan jumlah 43,895 jiwa.

## 2. Sosial dan Ekonomi

Secara kuantitas kondisi Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara relatif memadai untuk semua jenjang pendidikan. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia telah mengalami penambahan yang signifikan. Sekolah taman kanak-kanak misalnya, dari 31 unit pada tahun 2002 meningkat menjadi 92 unit pada tahun 2006 (83 unit TK milik swasta dan 3 unit milik pemerintah).

Demikian pula jumlah murid TK dari 1.898 orang pada tahun 2002, meningkat menjadi 4.474 orang pada tahun 2006 (bertambah rata-rata 18,71 persen per tahun).

## PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa di Kabupaten Aceh Utara

Berbagai usaha terus dilakukan dalam rangka pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa di Kabupaten Aceh Utara. Terutama dalam memberi perlindungan bagi anak sehingga memenuhi hak bagi anak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk bermain serta hak untuk tumbuh dan berkembang dalam dunia anak-anak yang layak. Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Utara bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membangun Taman Bermain Anak (TBA) atau yang dikenal dengan Semai Benih Bangsa Tahun 2003-2008 sebanyak 113 unit/lokasi, menggunakan meunasah-meunasah (bentuk bangunan yang khas dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar dan bermain bagi anak) tersebar di desa-desa dalam 22 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.

### Respons Masyarakat terhadap Aspek Ekonomi

Sebagai indikator adalah bagaimana Program Semai Benih Bangsa mempengaruhi dan mendorong ekonomi masyarakat di pedesaan. Analisa terhadap ekonomi masyarakat dapat dilihat dari 4 (empat) indikator berikut.

#### 1. Pendapatan Masyarakat untuk Biaya Anak Sekolah

Berdasarkan data terlihat bahwa responden yang menjawab sangat memadai pendapatan masyarakat untuk biaya anak sekolah di SBB sebanyak 28 responden atau 51,9% dari 54 responden. Hal ini menunjukkan pendapatan rata-rata masyarakat untuk biaya anak sekolah memadai. Amatan penulis iuran yang dibebankan pada masing-masing sekolah ini sangat bervariasi antara Rp. 2000 – Rp. 5000,- per bulan, hal ini bergantung pada kondisi masyarakat di daerahnya masing-masing.

#### 2. Pendapatan Masyarakat terhadap Kesesuaian Iuran Sekolah

Data menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat menjawab bahwa iuran sekolah selama ini sudah sesuai. Dimana sebanyak 32 responden atau 59,3% dari 54 responden menjawab sesuai, sebanyak 15 responden atau 27,8% sangat sesuai, sebanyak 5 responden atau 9,3% kurang sesuai, selanjutnya yang menjawab tidak sesuai sebanyak 2 responden atau 3,7%.

#### 3. Sumber Bantuan/Sumbangan terhadap Kegiatan Semai Benih Bangsa

Berdasarkan pada data terlihat bahwa sebanyak 6 responden atau 11,1% responden menjawab sumber dana dari individu, sementara yang menjawab sumber dana dari perusahaan sebanyak 48 responden atau 88,9% dan sumber dana dari yayasan dan LSM/NGO tidak ada. Hal ini menunjukkan sumber dana terhadap kegiatan Semai Benih Bangsa selain pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga sumber bantuan/sumbangan berasal dari perusahaan. Amatan penulis bahwa selama ini perusahaan Exxon Mobil Oil telah sangat membantu kegiatan ini baik bantuan fisik maupun dalam bentuk pelatihan dan pendidikan (Diklat) yang diberikan kepada guru-guru di Semai Benih Bangsa bekerjasama dengan Indonesia Heritage Foundation yang berlangsung di Jakarta dan

di Lhokseumawe. Selain itu ada juga bantuan dari yayasan Sukma (Metro TV) berupa fisik untuk pembangunan beberapa unit sekolah Semai Benih Bangsa dan insentif untuk para guru.

#### 4. Bantuan dalam Bentuk Peralatan Sekolah

Data menunjukkan sebanyak 48 responden atau 88,9% dari 54 responden menjawab sedikit sekali bantuan dalam bentuk peralatan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata respons masyarakat menjawab sedikit sekali bantuan dalam bentuk fisik/peralatan sekolah. Amatan penulis memang telah ada bantuan dalam bentuk peralatan sekolah akan tetapi secara keseluruhan masih memerlukan penambahan peralatan. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan anak-anak yang memerlukan alat-alat peraga yang digunakan dalam paktek kegiatan di sekolah.

#### Respons Masyarakat terhadap Infrastruktur

Sebagai indikator adalah bagaimana Program Semai Benih Bangsa mempengaruhi peningkatan infrastuktur di pedesaan untuk mendorong masyarakat di pedesaan dalam upaya peningkatan pendidikan anak di Kabupaten Aceh Utara. Aspek peningkatan infrastruktur ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator berikut:

##### 1. Ketersediaan Bangunan untuk Aktivitas Belajar

Saat ini Program Semai Benih Bangsa melakukan kegiatannya dengan memanfaatkan sarana yang ada di pedesaan. Yakni memanfaatkan struktur bangunan desa (meunasah/musholla) dimana stuktur bangunan tersebut adalah struktur panggung. Ruang kegiatan belajar yang dimanfaatkan adalah di bawah panggung bangunan desa (meunasah/musholla)

Terlihat bahwa respons rata-rata masyarakat dalam hal ketersediaan bangunan untuk aktivitas belajar saat ini sudah baik. Ini dibuktikan sebanyak 42 responden atau 77,6% dari 54 responden, selanjutnya sebanyak 9 responden atau 16,7% kurang baik. Selain pemanfaatan tempat yang telah dilakukan sebagai langkah penghematan biaya, sekaligus pemberdayaan, namun memang saat dimulainya Program Semai Benih Bangsa kondisi di Kabupaten Aceh Utara sedang dalam suasana konflik dimana

sangat sulit dilakukannya kegiatan-kegiatan pembangunan fisik bangunan.

##### 2. Bangunan yang Diharapkan

Responden yang menjawab menginginkan gedung permanen sebanyak 50 responden atau 92,6% dari 54 responden, sedangkan sebanyak 3 responden atau 5,6% gedung yang diinginkan semi permanen. Hal ini menunjukkan respons rata-rata masyarakat mengenai gedung yang diinginkan adalah gedung permanen. Seiring dengan perdamaian yang telah terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005, kondisi keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) khususnya Kabupaten Aceh Utara semakin membaik memungkinkan untuk dilakukannya berbagai aspek pembangunan.

##### 3. Ketersediaan Alat/Peralatan Belajar Mengajar

Sebagai penunjang kegiatan proses belajar pada sekolah Semai Benih Bangsa ini, peralatan-peralatan pendukung belajar merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Berdasarkan data terlihat bahwa respons masyarakat terhadap ketersediaan alat/peralatan belajar mengajar telah baik dan sebahagian lagi berespons kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil jawaban responden dimana sebanyak 28 responden atau 51,9% dari 54 responden menjawab sudah baik, sedangkan sebanyak 23 responden atau 42,6% menjawab kurang baik.

##### 4. Sarana Pendukung Sekolah

Dari hasil kunjungan peneliti kebeberapa lokasi penelitian terlihat bahwa prasarana pendukung sekolah masih sangat minim. Hal ini juga ditunjukkan oleh hasil jawaban responden yang menjawab tentang sarana pendukung sekolah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Sarana Pendukung Sekolah

Sarana Pendukung Sekolah	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat memadai	1	1.9
Memadai	10	18.5
Kurang Memadai	43	79.6
Tidak Memadai	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa responden yang menjawab kurang memadainya sarana pendukung sekolah sebanyak sebanyak 43 responden atau 79,6% dari 54 responden, 10 responden menjawab sudah memadai. Hal ini menunjukkan respons rata-rata masyarakat mengenai sarana pendukung sekolah tidak memadai. Amatan penulis di lapangan bahwa selama ini sarana pendukung sekolah (MCK, tempat sampah) masih menggunakan sarana dari fasilitas bangunan meunasah. Namun demikian sejak tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membangun sarana ini di 35 lokasi Semai Benih Bangsa.

### Respons Masyarakat terhadap Aspek Kelembagaan

Selain beberapa aspek yang telah disebutkan di atas, aspek pengembangan kelembagaan merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pengembangan wilayah. Adanya kelembagaan-kelembagaan baru di pedesaan menjadikan desa mempunyai wadah-wadah penyaluran aspirasi sebagai tempat untuk mengembangkan desa dari keterbelakangan dan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat di pedesaan. Selanjutnya peranan kelembagaan ditunjukkan melalui beberapa indikator berikut:

#### 1. Dukungan Perangkat Desa terhadap Kegiatan Program Semai Benih Bangsa

Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, dukungan masyarakat merupakan hal yang sangat diperlukan, karena tujuan dari pelaksanaan program itu sendiri adalah dapat bermanfaat kepada masyarakat. Tabel di bawah ini merupakan respons masyarakat terhadap dukungan perangkat desa selama kegiatan Program Semai Benih Bangsa ini beraktivitas.

**Tabel 2. Dukungan Perangkat Desa**

Dukungan Perangkat Desa	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Mendukung	20	37
Mendukung	32	59.3
kurang Mendukung	2	3.7
Tidak Mendukung	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

Berdasarkan pada Tabel 2 di atas sebanyak 20 responden atau 37% dari 54 responden, sementara yang menjawab mendukung sebanyak 32 responden atau 59,3% dan yang menjawab kurang mendukung sebanyak 2 responden atau 3,7%, selanjutnya tidak mendukung tidak ada responden yang menjawabnya. Hal ini menunjukkan rata-rata masyarakat mendukung apabila perangkat desa memberi dukungan terhadap kegiatan Semai Benih Bangsa.

#### 2. Peranan Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Partai Politik

Tabel berikut ini adalah respons masyarakat terhadap peranan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan partai politik terhadap pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa di pedesaan dapat dilihat sebagai berikut ini:

**Tabel 3. Peranan Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Partai Politik**

Peranan Tokoh Agama, Ormas, Partai Politik	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	5	9.3
Baik	24	44.4
Kurang Baik	25	46.3
Buruk Sekali	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa rata-rata respons sebahagian masyarakat menjawab mengenai peran tokoh agama, organisasi masyarakat, partai politik terhadap kegiatan Semai Benih Bangsa baik dan sebahagian lagi berespons kurang baik. Dimana yang menjawab kurang baik sebanyak 25 responden atau 46,3% dari 54 responden, sementara yang menjawab baik sebanyak 24 responden atau 44,4%, dan sebanyak 5 responden atau 9,3% menjawab sangat baik.

#### 3. Pertemuan Rutin dengan Komite Sekolah

Terbentuknya komite-komite sekolah merupakan bagian dari tujuan Program Semai Benih Bangsa. Namun demikian peran wadah ini belum berjalan seperti harapan.

Hal ini dapat ditunjukkan dari aktivitas yang dilakukan melalui tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 4. Pertemuan Rutin dengan Komite Sekolah**

Pertemuan Rutin dengan Komite Sekolah	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Sering	0	0
Sering	10	18.5
Jarang	40	74.1
Tidak Pernah	4	7.4
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

Berdasarkan pada Tabel 4 di atas terlihat bahwa responden tidak ada yang menjawab sangat sering melakukan pertemuan rutin dengan komite sekolah, sedangkan responden yang menjawab sering sebanyak 10 responden atau 18,5% dari 54 responden, sementara yang menjawab jarang sekali sebanyak 40 responden atau 74,1% dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 7,4%,. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat menjawab jarang sekali melakukan pertemuan rutin dengan komite sekolah.

#### 4. Fungsi Komite Sekolah

Selanjutnya fungsi komite sekolah secara keseluruhan ditunjukkan melalui hasil jawaban responden terhadap fungsi komite sekolah selama pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa adalah sebagai berikut ini:

**Tabel 5. Fungsi Komite Sekolah**

Fungsi Komite Sekolah	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Berfungsi dengan Baik	4	7.4
Baik	34	63
Kurang Baik	14	25.9
Tidak Berfungsi	2	3.7
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

Tabel 5 di atas terlihat bahwa responden menjawab fungsi komite sekolah berjalan dengan baik sebanyak 4 responden atau 7,4% dari 54 responden, sementara yang menjawab baik sebanyak 34 responden atau

63% dan yang menjawab kurang baik sebanyak 14 responden atau 25,9%. Hal ini menunjukkan respons rata-rata masyarakat mengenai fungsi komite sekolah sangat baik.

#### Respons Guru Sekolah terhadap Program Semai Benih Bangsa

Respons guru selama pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa dapat dilihat melalui beberapa indikator yang meliputi aspek sosial, ekonomi, infrastruktur dan kelembagaan. Respons guru dapat dilihat dari uraian berikut.

#### Respons Guru Semai Benih Bangsa terhadap Aspek Sosial

Sebagai indikator adalah bagaimana Program Semai Benih Bangsa mempengaruhi peningkatan infrastruktur di pedesaan untuk mendorong masyarakat di pedesaan dalam upaya peningkatan pendidikan anak di Kabupaten Aceh Utara. Aspek peningkatan infrastruktur ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator berikut.

#### 1. Hubungan antara Guru dengan Wali Murid

Keterlibatan guru dan wali murid dalam proses belajar anak sangat membantu suksesnya pelaksanaan program ini. Sinergisitas dalam proses belajar di sekolah dan di luar sekolah (rumah, lingkungan) merupakan hal penting dalam proses belajar itu sendiri. Berikut adalah tabel hubungan (interaksi) antara guru dan wali murid sebagai berikut:

**Tabel 6. Hubungan antara Guru dengan Wali Murid**

Hubungan antara Guru dengan Wali Murid	Jumlah Responden (jiwa)	Persentase (%)
Sangat sering	5	13.9
Sering	26	72.2
Jarang	5	13.9
Tidak Pernah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

Tabel 6 di atas terlihat bahwa rata-rata respons guru mengenai hubungan antara guru dengan wali murid sangat baik sekali karena seringnya berhubungan/interaksi. Hal ini ditunjukkan dengan responden yang menjawab sering sebanyak 26 responden

atau 72,2% dari 36 responden, sebanyak 5 responden atau 13,9% menjawab sangat sering dan jarang sebanyak 5 responden atau 13,9%.

## 2. Hubungan antara Guru dengan Anak dalam Proses Belajar Anak

Berdasarkan pada Tabel 7 menunjukkan rata-rata respons guru mengenai hubungan antara guru dengan anak dalam proses belajar sangat baik sekali. Ini terlihat sebanyak 18 responden atau 50% dari 36 responden menjawab sangat baik, sementara yang menjawab sering sebanyak 17 responden atau 47,2%. Amatan penulis interaksi anak-anak dan guru begitu dekat, dimana anak-anak telah terbiasa untuk berkomunikasi dengan guru dalam proses kegiatan belajar.

**Tabel 7. Hubungan antara Guru dengan Anak dalam Proses Belajar Anak**

Hubungan antara Guru dan Anak	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase
Sangat sering	18	50
Sering	17	47.2
Jarang	1	2.8
Tidak Pernah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisioner, 2008

## 3. Peran/Perhatian Wali Murid dalam Mendidik Anak

Selanjutnya perhatian wali murid dalam mendidik anak adalah suatu peran yang tidak dapat dipisahkan dan upaya peningkatan pendidikan. Hal ini disebabkan karena wali murid merupakan guru pertama terhadap anak-anaknya. Peran wali murid dalam mendidik anak sebagai berikut:

**Tabel 8. Peran/Perhatian Wali Murid dalam Mendidik Anak**

Peran/Perhatian Wali Murid dalam Mendidik Anak	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Sering	9	25
Sering	9	25
Jarang	18	50
Tidak Pernah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisioner, 2008

Berdasarkan pada Tabel 8 di atas terlihat bahwa responden yang menjawab sangat perhatian dalam mendidik anak sebanyak 9 responden atau 25% dari 36 responden, sementara yang menjawab memperhatikan sebanyak 9 responden atau 25% dan yang menjawab jarang sebanyak 18 responden atau 50%. Hal ini menunjukkan rata-rata respons guru mengenai peran wali murid dalam mendidik anak sebahagian sudah baik sebahagian lagi masih perlu peningkatan dalam memperhatikan kegiatan anak di sekolah.

## Respons Guru terhadap Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan salah satu pilar dalam pengembangan suatu wilayah. Ini menjadi penting mengingat tujuan akhir dari pengembangan wilayah itu sendiri adalah tercapainya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin. Beberapa indikator aspek ekonomi dapat dilihat sebagai berikut:

### 1. Respons dalam Membayar Iuran Sekolah Anak

Kegiatan ini adalah bersifat sosial. Biaya pendidikan secara keseluruhan adalah tidak dibebankan kepada masyarakat. Namun hanya dikutip biaya iuran bersama yang ditetapkan oleh komite sekolah. Berikut tabel keterlambatan dalam membayar iuran sekolah adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Menunggak Membayar Iuran Sekolah Anak**

Menunggak Membayar Iuran Sekolah	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Sering	9	25
Sering	9	25
Jarang	18	50
Tidak Pernah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisioner, 2008

Berdasarkan pada Tabel 9 di atas terlihat bahwa responden yang menjawab sangat sering terhadap tunggakan pembayaran iuran sekolah adalah sebanyak 9 responden atau 25% dari 36 responden, sementara yang menjawab sering sebanyak 9 responden atau 25% dan yang menjawab jarang sebanyak 18 responden atau 50%, selanjutnya tidak pernah tidak ada responden yang menjawabnya. Hal ini menunjukkan



rata-rata respons guru mengenai tunggakan pembayaran iuran sekolah oleh masyarakat sebagian menjawab telah baik dan sebagian masih kurang baik.

## 2. Kesesuaian Iuran yang Dibebankan Selama Ini

Kesesuaian iuran yang dikutip selama ini respons guru terhadap hal ini dapat ditunjukkan melalui tabel kesesuaian iuran sekolah sebagai berikut ini:

**Tabel 10. Kesesuaian Iuran Sekolah**

Kesesuaian Iuran Sekolah	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Sesuai	11	30.6
Sesuai	11	30.6
Kurang Sesuai	8	22.2
Tidak Sesuai	6	16.7
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisioner, 2008

Berdasarkan pada Tabel 10 di atas terlihat bahwa responden yang menjawab sangat sesuai terhadap iuran yang dikutip sebanyak 11 responden atau 30,6% dari 36 responden, sementara yang menjawab sesuai 11 responden atau 30,6% dan yang menjawab kurang sesuai sering sebanyak 8 responden atau 22,2%, selanjutnya tidak sesuai 6 responden yang menjawabnya. Hal ini menunjukkan rata-rata respons guru terhadap iuran yang dibebankan telah sesuai.

## 3. Bantuan dalam Bentuk Fisik/Peralatan

Peralatan dalam bentuk fisik merupakan bagian yang mendapat perhatian dalam upaya peningkatan pendidikan anak. Respons para guru Semai Benih Bangsa terhadap bantuan yang diterima dalam bentuk fisik/peralatan ditunjukkan

**Tabel 11. Bantuan dalam Bentuk Fisik/Peralatan**

Bantuan Bentuk Fisik/Peralatan	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Banyak	0	0
Banyak	2	5.6
Sedikit Sekali	28	77.8
Tidak Ada	6	16.7
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisioner, 2008

Berdasarkan pada Tabel 11 di atas terlihat bahwa respons guru terhadap ketersediaan alat/peralatan belajar mengajar, sebanyak 28 responden atau 77,8% dari 36 responden yang menjawab sedikit sekali, 6 responden atau 16,7% menjawab tidak ada dan hanya 2 responden atau 5,6% menjawab terdapat banyak bantuan peralatan belajar.

## Respons Guru terhadap Aspek Infrastruktur

Aspek infrastruktur sekolah Semai Benih Bangsa selama ini memanfaatkan struktur panggung bangunan musholla (meunasah) sebagai tempat aktivitas belajar anak-anak di pedesaan. Beberapa indikator terhadap aspek infrastruktur ini adalah sebagai berikut:

### 1. Ketersediaan Bangunan untuk Aktivitas Belajar Saat Ini

Respons ketersediaan bangunan untuk aktivitas belajar saat ini menurut guru sekolah Semai Benih Bangsa ditunjukkan oleh tabel hasil jawaban responden berikut ini:

**Tabel 12. Ketersediaan Bangunan untuk Aktivitas Belajar Saat Ini**

Ketersediaan Bangunan	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	2	5.6
Baik	28	77.8
Kurang Baik	6	16.7
Buruk	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisioner, 2008

Berdasarkan pada Tabel 12 di atas terlihat bahwa rata-rata respons guru terhadap ketersediaan bangunan untuk aktivitas belajar mengajar sudah baik. Hal ini ditunjukkan sebanyak 2 responden atau 5,6% dari 36 responden menjawab sangat baik, 28 responden atau 77,8% responden menjawab baik, 6 responden atau 16,7% menjawab kurang baik.

### 2. Pelaksanaan Perawatan Bangunan Sekolah

Pelaksanaan perawatan bangunan sekolah menjadi suatu hal yang terus dilakukan dalam menjaga terciptanya suasana belajar yang nyaman dan sehat. Perawatan bangunan sekolah selama ini dapat kita lihat dari respons guru sebagai berikut:

**Tabel 13. Pelaksanaan Perawatan Bangunan Sekolah**

Perawatan Bangunan Sekolah	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Memadai	2	5.6
Memadai	27	75
Kurang Memadai	5	13.9
Buruk	2	5.6
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

Berdasarkan pada Tabel 13 di atas terlihat bahwa rata-rata respons guru terhadap pelaksanaan perawatan bangunan sekolah untuk aktivitas belajar mengajar sudah baik. Hal ini ditunjukkan sebanyak 2 responden atau 5,6% dari 36 responden menjawab sangat baik, 27 responden atau 75% responden menjawab baik, 5 responden atau 13,9% menjawab kurang baik, dan 2 responden atau 5,6% menjawab sangat buruk

### 3. Ketersediaan Peralatan (Peraga, Simulasi) Belajar Mengajar

Respons guru terhadap ketersediaan peralatan (peraga, simulasi) dalam proses belajar selama ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 14. Ketersediaan Peralatan (Peraga, Simulasi) Belajar Mengajar**

Ketersediaan Alat Peraga	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	2	5.6
Baik	17	47.2
Kurang Baik	17	47.2
Sangat Buruk	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

Tabel 14 di atas menjelaskan bahwa rata-rata respons guru terhadap ketersediaan peralatan (peraga, simulasi) belajar mengajar di sekolah baik dan sebahagian lagi berespons kurang baik. Ini ditunjukkan dari responden yang menjawab baik sebanyak 17 responden atau 47,2% dari 36 responden, sementara yang menjawab kurang baik sebanyak 17 responden atau 47,2%, hanya 2 responden atau 5,6% menjawab sangat baik. Amatan penulis dilapangan alat-alat peraga dan simulasi sangat diperlukan oleh anak-anak karena anak-anak dapat langsung mempraktekkan setiap kegiatan belajar yang dilakukannya.

### Respons Guru terhadap Aspek Kelembagaan

Aspek pengembangan kelembagaan merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pengembangan wilayah. Adanya kelembagaan-kelembagaan baru di pedesaan menjadikan desa mempunyai wadah-wadah penyaluran aspirasi sebagai tempat untuk mengembangkan desa dari keterbelakangan dan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat di pedesaan. Selanjutnya peranan kelembagaan ditunjukkan melalui beberapa indikator berikut:

#### 1. Dukungan Perangkat Desa

Program Semai Benih Bangsa memiliki konsep yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan programnya. Dengan demikian diharapkan di samping pemerintah, masyarakat juga mengemban tanggung jawab terhadap pendidikan. Berikut respons guru terhadap dukungan perangkat desa yang ditunjukkan oleh tabel berikut:

**Tabel 15. Dukungan Perangkat Desa terhadap Kegiatan SBB**

Dukungan	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Mendukung	12	33.3
Mendukung	23	63.9
Kurang Mendukung	1	2.8
Tidak Mendukung	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

Berdasarkan Tabel 15 di atas terlihat bahwa rata-rata respons guru terhadap dukungan perangkat desa adalah sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari 12 responden atau 33,3% dari 36 responden yang menjawab sangat mendukung, 23 responden atau 63,9% yang menjawab mendukung. Ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam mendukung kegiatan Program Semai Benih Bangsa sudah sangat baik.

#### 2. Peranan Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Partai Politik

Selain perangkat desa, peranan tokoh agama, organisasi, dan partai politik juga diperlukan dalam upaya pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Respons guru terhadap hal sesuai dengan tabel berikut ini:

**Tabel 16. Peranan Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Partai Politik**

Dukungan Perangkat Desa	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Baik	6	16.7
Baik	17	47.2
Buruk	13	36.1
Buruk Sekali	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

Berdasarkan Tabel 16 di atas terlihat bahwa rata-rata respons guru terhadap dukungan perangkat desa sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari 6 responden atau 16,7% dari 36 responden yang menjawab sangat baik, 17 responden atau 47,2% yang menjawab baik, sementara 13 responden atau 36,1% responden menjawab masih kurang baik.

### 3. Pertemuan Rutin Bersama dengan Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan wadah penyaluran aspirasi yang terbentuk dalam upaya menghimpun setiap saran dan masukan serta upaya peningkatan partisipasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan guru guna pengembangan pendidikan selanjutnya. Respons guru terhadap pertemuan rutin dengan komite sekolah sesuai dengan hasil jawaban responden tabel berikut:

**Tabel 17. Pertemuan rutin bersama dengan komite sekolah**

Pertemuan Bersama Komite Sekolah	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Sangat Sering	0	0
Sering	6	16.7
Jarang	29	80.6
Tidak Pernah	1	2.8
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari kuisisioner, 2008

### 1. Output Uji Statistik Berpasangan

**Tabel 18. Uji Statistik Sampel Berpasangan**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum	493333.3333	36	104690.01863	17448.33644
Setelah	1044337.6069	36	136762.27042	22793.71174

Berdasarkan Tabel 17 di atas terlihat bahwa rata-rata respons guru terhadap pertemuan rutin bersama dengan komite sekolah masih jarang dilakukan. Hal ini ditunjukkan dari 6 responden atau 16,7% dari 36 responden yang menjawab sering dilakukan, 29 responden atau 80,6% yang menjawab jarang dilakukan pertemuan.

### PEMBAHASAN

#### Analisis Perbedaan Pendapatan Rata-Rata Guru Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa

Analisis perubahan jumlah pendapatan selanjutnya dilakukan melalui uji beda (uji t), dengan rumus yang tercantum pada metode penelitian, diperoleh data yang ditunjukkan pada Tabel 18.

Dari uji statistik tersebut terlihat bahwa pendapatan rata-rata sebelum menjadi guru yaitu sebesar Rp. 493.333/bulan, sedangkan pendapatan rata-rata setelah menjadi guru yaitu sebesar Rp. 1.044.337/ bulan.

#### Uji Beda Dua Mean Berpasangan

Berdasarkan output pada Tabel 19 terlihat t hitung yaitu 46,571 dengan alpha 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%, sementara t tabel yaitu 1.689. Hal ini berarti t hitung > dari t tabel dan probabilitas < 0,05 dengan demikian H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, artinya terdapat perbedaan tingkat pendapatan rata-rata sebelum dan sesudah menjadi guru pada Program Semai Benih secara signifikan. Dimana pendapatan sesudah menjadi guru pada Program Semai Benih Bangsa adalah lebih tinggi.

Pendapatan guru meningkat disebabkan karena, antara lain: selain dari aktivitas terdahulu, para guru mendapatkan tambahan pendapatan baik dari gaji/honor, maupun insentif lainnya selama pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa.

**Tabel 19. Uji Beda Dua Mean Berpasangan**

		Pair 1
		Sebelum – Setelah
Paired Differences	Mean	-551004.27361
	Std. Deviation	70988.56745
	Std. Error Mean	11831.42791
	95% Confidence Interval of the Difference	
	Lower	-575023.34921
	Upper	-526985.19801
T		-46.571
Df		35
Sig. (2-tailed)		.000

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab terdahulu, maka pada bagian ini dirumuskan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Secara umum terdapat peningkatan jumlah anak usia dini yang dapat mengikuti proses belajar di sekolah. Sedangkan respons masyarakat dan guru secara umum menyatakan telah terjadi interaksi atau hubungan antara masyarakat, guru, dan anak dalam proses belajar dengan kegiatan yang diselenggarakan dalam pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa ini.
2. Dengan pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa ini aspek ekonomi telah membantu memberdayakan masyarakat (guru) setempat baik untuk mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Indonesia Heritage Foundation, juga mendapatkan tambahan pendapatan.

Pelaksanaan Program Semai Benih Bangsa telah memberikan pengaruh terhadap keberadaan sarana dan prasarana di pedesaan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus terus mencari formulasi baru terhadap perencanaan pendidikan serta berupaya dan mendorong perkembangan Program Semai Benih Bangsa sebagai salah satu wujud peningkatan pendidikan anak usia dini dalam proses pembangunan sumber daya manusia di pedesaan.

2. Masyarakat hendaknya merubah paradigma lama yang beranggapan bahwa anak-anak usia dini tidak perlu belajar (sekolah) dan terus berupaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini seiring dengan tantangan di masa depan yang semakin kompleks sehingga partisipasi masyarakat dalam pembinaan proses belajar anak baik di rumah di sekolah dan lingkungannya berjalan sebagai proses pembelajaran.
3. Kepada pihak swasta hendaknya menjadikan program pendidikan terhadap anak usia dini merupakan bagian dari kegiatannya dalam rangka ikut berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aldwin Surya. 2006. *Perubahan Sosial Masyarakat Kota Metropolitan*. Kopertis Wilayah I NAD-Sumut. Medan – Indonesia.
- Haeruman Js, Herman. 1997. *Instrumen-instrumen Penerapan Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Jalill, Sofyan dan Megawangi, Ratna. 2006. *Peningkatan Mutu Pendidikan di Aceh Melalui Implementasi Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter*. Orasi pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke 45 Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Miraza, Bachtiar Hassan. 2008. *Mencermati Perilaku Entrepreneur*. USU Press. Medan – Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*. Bandung: ISEI.
- Megawangi, Ratna. 2004. *Pendidikan Karakter. Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: BP MIGAS dan Star Energy.
- Nugroho. D, Riant. 2003. *Reinventing Pembangunan. Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Tarigan, Robinson, 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro P. Michael. 2000. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Erlangga. Jakarta.
- Tampubolon, Mangatas. Tesis *Problematik dan Prospek Pembangunan Masyarakat Desa Ditinjau dari Segi Pendidikan Non Formal*.
- Williams, Russel T dan Megawangi, Ratna., *Kecerdasan Plus Karakter*. Jurnal Pendidikan.

# **DESTINATION BRAND: MEMBANGUN KEUNGGULAN BERSAING DAERAH**

**Syafrizal Helmi Situmorang**

Staf Pengajar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi USU  
Shelmi@telkom.net

***Abstract:** All successful brands have social, emotional and identity value to users: they have personalities and enhance the perceived utility, desirability and quality of a product. Every country, regional or state should build destination brand for competitive advantage. A destination brand can be developed in a variety of ways, most obviously in advertising, through direct marketing, personal selling, on websites and in brochures, but also through public and media relations, and through the co-operation of destination marketing organizations (DMOs).*

***Keywords:** regional branding and competitive advantage*

## **PENDAHULUAN**

Negara kita, Indonesia dikaruniai oleh sang pencipta dengan berbagai macam potensi kekayaan alam dan paranoma keindahan yang luar biasa. Sayangnya potensi dan asset keindahan alam yang ada kurang dikelola dengan baik. Di Asia Tenggara, Indonesia hanya menduduki peringkat keempat dalam kunjungan wisman. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan jumlah wisman 15 juta per tahun, peringkat kedua dan ketiga ditempati Malaysia dengan wisman 10 juta per tahun dan Thailand 10 juta wisman per tahun). (Kompas, 7 November 2008). Dalam Forum UNWTO ke-6, di Cebu Philipina pada bulan Oktober 2008 pariwisata Indonesia dinilai mulai pulih dari krisis. Jika tahun 2004 tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) adalah 5,32 juta orang, tahun 2005 menjadi 4,96 juta orang atau merosot 7 persen, dan tahun 2006 sebesar 4,87 juta atau turun 2 persen, maka tahun 2007 kembali meningkat jadi 5,5 juta orang atau naik 13 persen. Diharapkan dengan adanya program Visit Indonesia Year 2008, pemerintah optimistis menargetkan kunjungan wisman tahun ini mencapai 7 juta orang dengan nilai devisa 6,7 miliar dollar AS dan tahun 2009 target wisman juga dinaikkan jadi 8 juta orang dengan nilai devisa 8 miliar dollar AS. (akuindonesia.wordpress.com)

Program Visit Indonesia Year yang dicanangkan tahun 2008 telah berakhir, Program yang diharapkan menjadi gaung kebangkitan industri pariwisata belum

menunjukkan keberhasilan yang maksimal. Industri pariwisata kita masih separuh terlelap dan belum sadar menjual potensi yang ada. Hal ini sebabkan minimnya faktor penunjang utama pariwisata, seperti hotel, restoran, transportasi, dan infrastruktur dan jasa pemandu profesional.

Pariwisata sebagai industri yang menimbulkan efek multidimensional, yakni membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, hingga sumber pendapatan daerah yang menjadi penopang perekonomian nasional. Pengelolaannya memerlukan langkah integratif pemerintah dan pelaku usaha. Pengelolaan itu dibuktikan tidak hanya dengan keseriusan pemda untuk memperbaiki fasilitas dan sarana wisata, kemudahan layanan imigrasi, transportasi memadai, tetapi juga peran pelaku usaha dalam mengelola kawasan wisata, hingga pemasaran produk khas daerah.

Menurut Jero Wacik hanya tujuh dari 33 provinsi di Indonesia yang secara swadaya giat berpromosi dan mendorong pariwisata, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Barat. Selebihnya, pemerintah daerah masih mengandalkan pemerintah pusat untuk mempromosikan daerahnya. Bahkan Sejak tahun 2007, pemerintah menggulirkan dana stimulan sebesar Rp 25 miliar kepada lima provinsi setiap tahun yang dianggap mulai berkiprah membangkitkan pariwisata. Hingga tahun ini, sudah ada 10 provinsi yang mendapatkan bantuan dana itu, yakni Sumatera Barat,

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Irian Jaya Barat.

Menurut Pike (2002) Pembahasan mengenai pentingnya perencanaan destinasi dibahas dalam berbagai penelitian seperti destination planning and management (Godfrey & Clarke 2000; Howie 2003; Laws 1995; Lickorish 1992; WTO 1994), urban destinations, case studies of "tourist organizations" (Pearce 1992), destination marketing (Goodall & Ashworth 1990), the promotion of places (Ashworth & Voogd 1990; Gold & Ward 1994), destination branding (Morgan *et al.* 2002), and destination crisis marketing (Beirman 2003a).

Tulisan ini mencoba meneluri bagaimana pentingnya membangun destination branding bagi sebuah daerah di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Brand Vision*

Bisnis pariwisata identik dengan citra (image) sehingga citra harus dikembangkan ke arah yang positif. Jika citra pariwisata Indonesia baik dan aman, turis dengan sendirinya akan berdatangan. Saat ini kita mulai melihat beberapa kota impian yang bermunculan di Asia: seperti Malaysia, Singapura, Shanghai, Dubai, mulai menampilkan visi *Brand Destination* mereka untuk 20-30 tahun kedepan.

Tetangga kita Malaysia untuk mencapai posisinya sekarang membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kerja keras yang panjang. Malaysia mulai merencanakan kebangkitannya mulai awal 1980an dan hasilnya baru terlihat nyata dalam tahun 2000 awal. Agar daerahnya dikunjungi melakukan persiapan serius melalui program *Malaysia Tourism*. Dengan *tagline* "Truly Asia" Malaysia memosisikan (*positioning*) daerahnya sebagai Asia sebenar-benarnya. Persiapan untuk program ini dilakukan secara serius melalui program terbang murah ke Malaysia (visit Malaysia), *Great Sales*, festival, serta hotel yang nyaman. Malaysia ingin pengunjung yang datang merasa betah, nyaman dan terkesan (*memorable experience*) sehingga mereka akan ingin pengunjung

akan kembali lagi atau merekomendasikan Malaysia sebagai daerah tujuan wisata kepada rekan-rekannya (*customer loyalty*)

Sheikh Mohammed bin Rasyid Al Maktoum mengembangkan dan mentransformasi Dubai menjadi Hunian kelas dunia melalui The Luxury Palm Jumeirah Island dan juga Burj Al Arab, Burj Dubai. 40 hektar lahan baru dikemas sebagai hunian yang *high performance, highly sustainable and green commercial development* untuk *sustainable future* di Dubai. Dengan visi- visi destinasi inilah yang membuat mata dunia tertuju di Dubai dan akhirnya investor/pebisnis/masyarakat asing dan lokal melihat dampak dari visi tersebut dan berinvestasi di destinasi tersebut

Shanghai, dikenal sebagai kota yang sejajar dengan London dan New York pada era 1930-1940an juga mulai berbenah sebagai kota Modern sejak tahun 1982. Shanghai tidak hanya menargetkan sebagai kota yang modern saja melainkan kota tempat impian orang-orang untuk hidup dan bekerja disana. Shanghai berbenah dari kota industri ke kota informasi dan pengetahuan. Untuk mewujudkan impiannya Shanghai menjadi tuan rumah pada acara World Expo 2010 dengan tema revitalisasi kota (Gilmore, 2004)

Singapura mulai mengimplementasikan visi destinasinya sejak tahun 1995 dengan membentuk 4 rencana pengembangan wisata melalui *four National Tourism Plan Committees (NTPC)* Singapura. Berdasarkan laporan *Singapore Tourism 21: Vision of a Tourism Capital* mereka memberi wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola dan meredefinisikan *Singapore tourism industry* dengan membentuk *Singapore Tourism Promotion Board (SPTB)* yang kemudian berganti nama menjadi *Singapore Tourism Board (STB)* pada tahun 1997. Hasilnya pada tahun 1996 SPTB melakukan Branding destinasi dengan *tagline* Singapura sebagai *New Asia*. Pemilihan nama New Asia merupakan hasil survey yang melibatkan 1300 responden turis. Responden diberikan berbagai pilihan alternatif dan jawaban terbanyak memilih New Asia sebagai Tagline. New Asia memberikan visi yang jelas bagaimana Singapura memosisikan negaranya sebagai *tourism industry*. (Ooi, 2004) Negara

dengan luas 680 Km<sup>2</sup> dan populasi kurang lebih 4 juta orang, kini Singapura berhasil menarik wisata 7 juta wisman pada tahun 2002 dan 15 juta tahun 2008.

Bagaimana dengan Indonesia? saat ini pariwisata Indonesia yang terkenal adalah Bali, bahkan Sri Lanka tidak segan-segan menproklamkan daerahnya sebagai New Bali demi menarik wisatawan mancanegara ke Sri Lanka. Sayangnya Bali sebagai daerah tujuan yang tersohor di dunia sejak puluhan tahun baru ternyata baru melakukan brand image secara serius pada penghujung Desember 2006. Padahal brand Bali mestinya muncul seiring dengan denyut nadi pulau dewata yang menjadikan pariwisata sebagai *leading sector*. Walaupun Bali sudah mempunyai Tag line yakni *Bali is My Life*. Namun *tag line* bukan *branding* tapi dengan lebih pada pedoman untuk mencari *branding*. Baru pada tahun 2008 muncul branding Bali yang baru yakni. *Santhi Santhi Santhi*. Pijakan utama dari branding tersebut salah satunya adalah keinginan responden masyarakat Bali asli sejumlah 900 orang yang prosentase terbesarnya mengharapkan bahwa penggambaran Bali yang paling baik adalah *paradise* dengan pendekatan spiritual yang divisualkan dengan pura. Branding Bali yang baru divisualisasikan dengan gambar segi tiga bertuliskan Bali Shanti Shanti Shanti yang merupakan semangat dari Tri Murti dan Tri Hitakarana. Shanti yang berarti damai tertulis tiga kali berarti mengalir semangat kedamaian dan keharmonisan.

Membuat branding sebuah daerah bukanlah hal yang mudah dibutuhkan analisis lingkungan daerah yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal meliputi potensi suatu daerah, keuangan, produk unggulan, kelemahan dsb, sedangkan Analisis lingkungan eksternal meliputi analisis perubahan (*change*), analisis pesaing (*competitor*), dan analisis pelanggan (*customer*) (Situmorang, 2007). Selain itu perlu juga dilakukan analisis perubahan (*change*) meliputi teknologi, dinamika ekonomi, perkembangan politik, regulasi, pergeseran sosial budaya dan perubahan pasar. Sedangkan analisis pesaing (*competitor*) melihat tiga dimensi dari pesaing yakni (*General, Aggresiveness, dan Capability*). Dimensi *General*

menggambarkan jumlah pesaing baik riil maupun potensial. Dimensi *Aggresiveness* menggambarkan seberapa jauh para pesaing menerapkan strateginya secara efektif dan kreatif. Sedangkan dimensi *Capability* melihat kemampuan pesaing dari berbagai aspek yakni kepemimpinan daerah, kondisi faktor produksi daerah (tenaga kerja, infrastruktur dan teknologi) (Kartajaya dan Yuswohadi, 2005)

### **Membangun Merek Sebuah Daerah**

Brand (merek) menjadi faktor pembeda yang sangat penting dalam lautan produk/jasa yang sejenis. Kita sama-sama setuju banyak sekali daerah di Indonesia ini yang mempunyai panorama alam dan tempat wisata yang indah yang tidak kalah dengan Bali apalagi Singapore atau Malaysia. Apa yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lain walaupun sama-sama memiliki daerah wisata yang menarik? yang membedakan adalah faktor merek (brand). Brand mempunyai makna psikologis dan simbolis yang istimewa di mata Turis atau wisatawan. Dengan kata lain ketika *brand equity* sudah terbentuk maka ia menjadi milik daerah yang sangat berharga yang jauh lebih berharga dari asset daerah yang lainnya. Sebuah brand bisa menjadi sumber pendapatan sebuah daerah.

Untuk itu dalam membangun sebuah brand tidak hanya melibatkan penciptaan *perceived difference* melalui iklan, tetapi juga harus didukung dengan produk/jasa yang berkualitas, strategi penetapan harga, dan distribusi yang tepat untuk mendukung citra (*brand image*) tersebut yang dikomunikasikan melalui iklan produk/jasa tersebut. Di belakang sebuah brand yang kuat, setiap tahap dan aspek dalam proses pemasaran harus bekerja secara sempurna. Segmentasi, pemilihan segmen pasar, dan positioning dilakukan dengan cermat untuk memilih pasar sasaran yang tepat, mengerti apa yang benar – benar menjadi kebutuhan dan hasrat konsumen sasaran, dan menempatkan produk dalam benak konsumen. Selanjutnya brand menjadi semacam sebuah kontrak kepercayaan antara perusahaan dan konsumen karena ia menjamin adanya konsistensi bahwa sebuah produk/jasa akan selalu dapat menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen darinya.



Upaya membangun merek sebuah daerah tidak bisa dilepaskan dari besarnya budget promosi dari daerah tersebut. Semakin sering dipromosikan sebuah daerah maka daerah akan semakin dikenal dan diingat oleh konsumen. Karena itu mengeluarkan biaya promosi untuk sebuah merek merupakan bagian dari investasi daerah yang bersifat *intangible*. Keller (2000) mengajukan sebuah model pengembangan merek yang disebut sebagai *customer-based brand equity* (CBBE). Kita dapat membangun model ini didasarkan pada empat pertanyaan berdasarkan model Keller utama.

1. Seberapa jauh daerah dapat secara jelas merumuskan identitas merek (who are you?).
2. Seberapa jauh daerah mengembangkan asosiasi yang mempunyai arti tertentu bagi wisatawan (what are you?).
3. Bagaimana tanggapan wisatawan terhadap asosiasi yang ditawarkan oleh merek daerah (what about you?).
4. Seberapa jauh interaksi yang terjadi antara wisatawan dan merek menyebabkan ikatan antara keduanya menjadi lebih kuat (what about you and me?).

### **Brand Equity**

*Brand equity* adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. Menurut Aaker (1991), *brand equity* dapat dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu:

1. *Brand awareness* (kesadaran merek) menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu.
2. *Brand Association* (asosiasi merek) mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga, pesaing, selebritis, dan lain-lain.

3. *Perceived quality* (persepsi kualitas) mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan.
4. *Brand loyalty* (loyalitas merek) mencerminkan tingkat keterikatan konsumen dengan suatu merek produk.
5. *Other proprierty brand assets* (aset-aset merek lainnya).

### **Brand Awareness**

*Brand awareness* adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Tingkatan *brand awareness* yang berbeda yang dapat digambarkan dalam suatu piramida berikut ini. Peran *brand awareness* dalam *brand equity* tergantung pada tingkatan akan pencapaian kesadaran dibenak konsumen. Tingkatan *brand awareness* yang paling rendah adalah *brand recognition* (*pengenalan merek*) atau disebut juga sebagai tingkatan pengingatan kembali dengan bantuan (*aided recall*). Tingkatan berikutnya adalah tingkatan *brand recall* (*pengingatan kembali merek*) atau tingkatan pengingatan kembali merek tanpa bantuan (*unaided recall*) karena konsumen tidak perlu dibantu untuk mengingat merek.

### **Brand Association**

*Brand association* (*asosiasi merek*) adalah segala kesan yang muncul dibenak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Berbagai asosiasi merek yang saling berhubungan akan menimbulkan suatu rangkaian yang disebut *brand image*. Pada umumnya asosiasi merek (terutama yang membentuk *brand image* –nya) menjadi pijakan turis dalam keputusan pembelian dan loyalitasnya pada merek tersebut. Berbagai fungsi asosiasi tersebut adalah: (1) *Help process/retrieve information* (membantu penyusunan informasi) (2) *Differentiate* (*membedakan*) (3) *Reason to buy* (*alasan pembelian*) (4) *Create positive attitude/feelings* (*menciptakan sikap atau perasaan positif*) (5) *Basis for extentions* (*landasan untuk perluasan*).

### **Perceived Quality**

*Perceived quality* dapat didefinisikan sebagai persepsi turis terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh turis. Dimensi *perceived quality* dibagi menjadi tujuh, yaitu: (1) Kinerja: melibatkan berbagai karakteristik operasional utama (2) Pelayanan: mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada produk/jasa yang ditawarkan (3) Keandalan: konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu pelayanan ke pelayanan lainnya (4) Karakteristik jasa yang ditawarkan seperti budaya, tari-tarian dan pertunjukan, wisata kuliner, tempat peristirahatan dll (5) Kesesuaian dengan spesifikasi: merupakan pandangan mengenai spesifikasi yang telah ditentukan dan teruji.

### **Brand Loyalty**

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, *brand loyalty* dapat menjadi aset strategi bagi daerah. Berikut ini adalah beberapa potensi yang dapat diberikan oleh *brand loyalty* kepada perusahaan: (1) *Reduced marketing cost* (mengurangi biaya pemasaran) artinya lebih mudah mempertahankan turis dibandingkan dengan upaya untuk mendapatkan turis baru. Jadi biaya pemasaran akan mengecil jika *brand loyalty* meningkat (2) *Trade leverage* (meningkatkan perdagangan); Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan peningkatan perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran. (3) *Attracting new costumers* (menarik minat turis baru). (4) *Provide time to responsd competitive threaths* (memberi waktu untuk merespons ancaman persaingan). *Brand loyalty* akan memberikan waktu pada sebuah daerah untuk merespons gerakan pesaing. Turis yang loyal akan memberikan waktu pada daerah tersebut memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau menetralsasikannya. Misalnya ketika terjadi kasus peledakan bom Bali, banyak turis yang tetap loyal dan memberikan waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki dan memulihkan suasana.

### **Destination Branding**

Destination Branding adalah sebuah strategi bagaimana memasarkan potensi

sebuah daerah. Dalam strategi destination branding di banyak tempat setidaknya ada enam elemen penting pembentuk destination branding atau prasyarat terciptanya destinasi yang baik dan pariwisata adalah salah satu komponennya. Komponen yang lainnya adalah people, governance, export, investment/immigration, culture & heritage. Sebuah konsep destination branding, didasari oleh passion dan identitas yang menarik yang saling berhubungan dengan berbagai hal yang akan memudahkan orang memiliki asosiasi dengan tempat tersebut. Destination branding diyakini memiliki kekuatan untuk merubah persepsi dan merubah cara pandang seseorang terhadap suatu tempat atau tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat dengan tempat lainnya untuk dipilih sebagai tujuan.

Mengubah image sebuah daerah merupakan bagian dari *destination branding*. Perubahan images sebuah daerah dapat dilakukan melalui banyak cara misalnya melalui *media relations* seperti *Advertising, direct marketing, personal selling, websites, brochures*, atau Event organizers, film-makers, destination marketing organizations (DMOs) Serta journalists. Dari kerja sama diatas diharapkan akan mengkomunikasikan daerah tersebut secara selektif kepada target audiens. Contohnya jepang, 30 tahun lalu kita akan sepele melihat produk buatan jepang (made in japan), sekarang kita melihat produk jepang merupakan jaminan mutu (Morgan, Pritchard dan Pride, 2004).

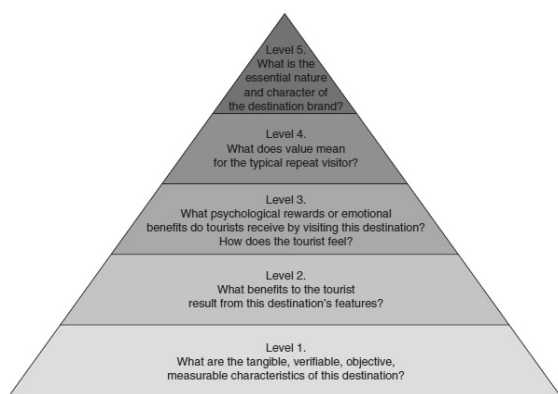
Destination branding akan merubah persepsi turis dan negative menjadi positif. Untuk itu para marketer daerah perlu melakukan *strategy mapping* mengenai potensi daerah yang siap dikembangkan dan strategi apa yang bisa dikembangkan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. Morgan and Pritchard (2002) menyarankan 5 tahapan untuk melakukan *destination branding* dalam merubah image sebuah daerah.

1. Market investigation, analysis and strategic recommendations: pada tahapan ini marketer daerah melakukan riset pemetaan potensi pasar, hal-hal apa saja yang bisa dikembangkan dan penyusunan strategi.

**Tabel 1. Menerjemahkan Konsep ke Aksi**

Tugas marketing	Fungsi marketing
Mengidentifikasi kebutuhan turis	Riset pemasaran
Menganalisa peluang di pasar	Segmentasi Pasar
Menciptakan product sesuai permintaan pasar	Perencanaan dan formulasi produk
Menentukan nilai produk/jasa dalam berbagai situasi	Kebijakan harga
Memastikan ketersediaan produk/jasa	Kebijakan distribusi
Menginformasikan dan memotivasi turis	Strategy promosi

2. *Brand identity development.* Brand Identity dibentuk berdasarkan visi, misi dan image yang ingin dibentuk daerah tersebut. Dari hasil riset ditentukan beberapa alternative lalu di pilih satu buah *tagline* untuk menggambarkan daerah tersebut. Proses riset dapat dilihat pada gambar dibawah, misalnya **Thailand:** “Amazing Thailand”, **Hong Kong:** Asia’s Word City” dsb. Pike (2004) menyebutkan *Brand Identity* yang dibangun diubah menjadi *brand positioning* yang akhirnya diharapkan menjadi *brand Image*.

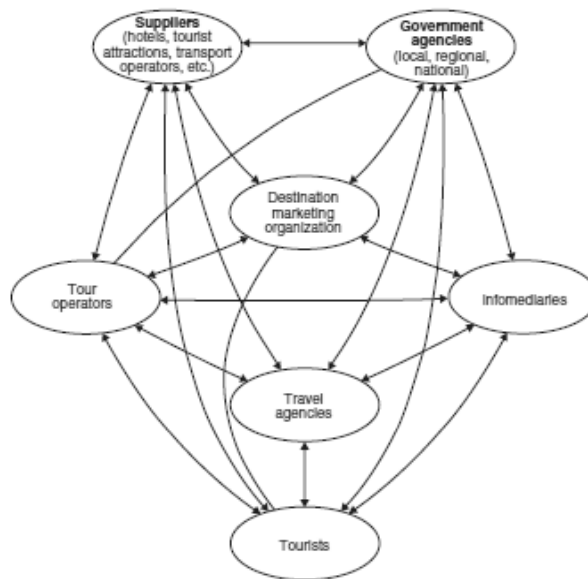


**Gambar 1. The Destination Brand Benefit Pyramid**

3. *Brand launch and introduction: communicating the vision.* Setelah tagline diperkenalkan maka brand yang ada diperkenalkan dengan melibatkan

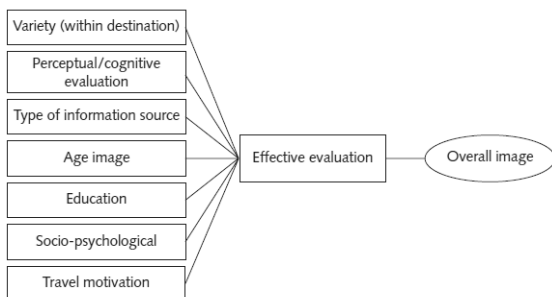
seluruh komponen yang ada melalui *media relations* seperti *Advertising, direct marketing, personal selling, websites, brochures,* atau *Event organizers, film-makers, destination marketing organizations (DMOs) Serta journalists.*

4. *Brand implementation.* Brand adalah sebuah janji. Semua pihak-pihak yang terlibat mulai dari pemerintah, pihak hotel, Travel agensi, masyarakat setempat harus berusaha mewujudkan janji yang diucapkan. Sehingga *touris* yang datang akan merasa betah dan terkesan dengan daerah tujuan. Kasus yang sering terjadi adalah banyak daerah yang panorama alamnya indah, namun kurangnya sarana perhoten yang memadai serta perilaku penduduk dan pengusaha lokal yang kurang ramah dan pelayanan, belum adanya standar tarif jasa di sejumlah daerah tujuan wisata sehingga rentan menimbulkan pungli dan meresahkan wisatawan. Akhirnya Brand yang dibentuk menjadi sia-sia.



**Gambar 2. Keterkaitan Semua pihak dalam implementasi brand**

5. *Monitoring, evaluation and review.* Program sedang yang dilaksanakan dilakukan monitoring apakah ada penyimpangan, kekurangan dan sebagainya. Dari hasil monitoring dilakukan evaluasi dan review untuk perbaikan selanjutnya.

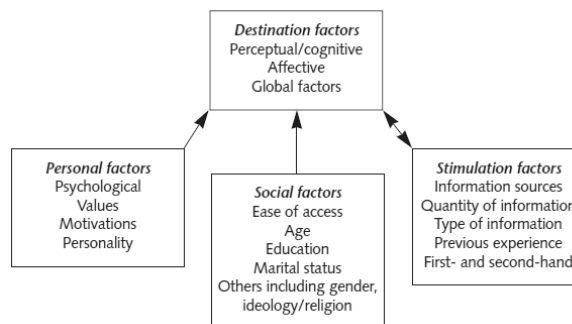


**Gambar 3. Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Brand Image**

**Beberapa Tantangan dan Kendala**

Tantangan dan kendala dalam menyusun *destination branding* adalah kurangnya Promosi, sdm, fasilitas infrastruktur, transportasi, layanan imigrasi, pemasaran produk daerah, perilaku penduduk dan pengusaha lokal serta keterbatasan anggaran. Misalnya Untuk Tahun 2008, total anggaran pariwisata indonesia adalah adalah Rp 1,08 triliun. Sasaran promosi wisata difokuskan pada 12 pasar utama pariwisata, di antaranya Perancis, Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, Jepang, Singapura, Australia, Korea, Malaysia, dan China. Disektor transportasi banyak maskapai penerbangan yang belum memiliki rute terbang ke daerah-daerah tujuan wisata.

Tantangan berikutnya adalah image bahwa negara kita sering di cap ”jelek” karena berbagai pemberitaan yang ada. Sehingga persepsi wisatawan terhadap indonesia menjadi buruk. Baloglu and McCleary (1999) mengidentifikasi 3 faktor yang mempengaruhi pencitraan destinasi yakni personal faktor, sosial faktor dan stimulasi.



**Gambar 4. 3 Faktor yang Mempengaruhi Pencitraan Destinasi**

Untuk mengatasi crisis kepercayaan wisatawan terhadap sebuah daerah beirman (2003) menawarkan 4 langkah yakni:

1. mengidentifikasi penyebab masalah yang menyebabkan crisis (*Identify the event/problem as either a crisis or a hazard*).

**Tabel 2. Identify the Event/Problem as Either A Crisis or A Hazard**

Identify problem	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Will this event/problem be widely and negatively publicised in key source markets?</li> <li>• Does it have the potential to threaten the safety or well-being of tourists?</li> <li>• Were tourists directly affected?</li> <li>• Have foreign governments altered or threatened negative travel advisories as a result of the event/problem?</li> <li>• Have insurance companies deleted or limited coverage to the destination?</li> <li>• Are airlines, shipping, rail or coach operators and tour operators considering withdrawing or limiting services and products to the destination?</li> <li>• Are travel agents in source markets reducing bookings to the destination?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Are media groups hosted by the destination grossly delaying publication, broadcast or screening of material about the destination with or without explanation?</li> <li>• Is there a statistically significant (seasonally adjusted) drop in arrivals and hotel occupancy levels?</li> <li>• Is there pressure within the tourism infrastructure to reduce employment levels?</li> <li>• Is there a local sense of political urgency regarding the prospects of the tourism industry?</li> <li>• Are tourism receipts significantly (seasonally adjusted) reduced?</li> <li>• Are the destination representatives overseas or interstate reporting a</li> <li>• substantial growth of negative inquiries from the public and the travel</li> <li>• industry? Is there substantial growth in cancellations and a reduction in forward bookings?</li> </ul>

2. Pembentukan crisis management team: bekerjasama melalui media and public relations, travel industry, *tour operators, airlines and hospitality industry, good staff, local tourism, local government* dsb.
3. Mempromosikan destinasi selama dan setelah crisis (*Promote the destination during and after the crisis*).
4. memonitor pemulihan dan menganalisis penyebab krisis (*Monitor recovery and analyse the crisis experience*)

#### KESIMPULAN

Indonesia sebagai daerah yang memiliki berbagai keunggulan dan potensi sumber daya alam dan budaya yang melimpah merupakan *starting point* yang sangat baik dalam menyusun dan mengemas ulang *brand destination* disetiap daerah. Khususnya Sumatera Utara yang mempunyai berbagai keunggulan pariwisata yang seperti danau toba sangat disayangkan jika tidak dikelola dengan baik, terencana dan profesional. Dibutuhkan kerja keras dan kerja sama berbagai berbagai pihak agar industri pariwisata kita bisa maju dan menjadi sumber bagi pendapatan daerah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Aaker, david, 1991, *Managing Brand Equity, Capitalizing On The Value Of Brandname*, free Press, New York.
- Beirman, David, 2003, Restoring Tourism destinations In crisis, *A strategic marketing approach, Allen & Unwin, Australia*.
- Baloglu, Sehyous and McCleary, Ken, 1999 'Model of Destination Image Formation', *Annuals of Tourism Research*, Vol. 26, No. 4.

Crockett, Shane R and Wood, Leiza J, 2002, *Western Australia: Building A State Brand* Elsevier Butterworth-Heinemann, London.

Dubai Life Issue 02, *Old and New A Tale of Two Cities*, Juni 2006.

Gilmore, Fiona, 2004, Brand Shanghai: harnessing the inner force of people and place, Elsevier Butterworth-Heinemann, London.

Grahadyarini, BM Lukita, 2007, Menakar Gaung Visit Indonesia Year, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/07/01214479/menakar.gaung.visit.indonesia.year>, di akses tanggal 23 november 2008.

Kartajaya, Hermawan dan Yuswohady, 2005, *Attracting Tourists, Traders, Investor: Strategi memasarkan Daerah*, Penerbit Gramedia Jakarta.

Morgan N, Pritchard Annette and Pride, Roger, 2004, *Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition*, second edition, Elsevier Butterworth-Heinemann, London.

Ooi, Can Seng, 2004, Brand Singapore: the hub of 'New Asia', *Elsevier Butterworth-Heinemann*, London.

Pike, Steven, 2004, Destination Marketing Organization, Advance in research Tourism series, *Elsevier Butterworth-Heinemann*, London.

Situmorang, Syafrizal Helmi, 2007, Regional Branding, *Jurnal Wahana Hijau*, PWD USU, Medan.

# PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN DI KECAMATAN TANAH JAWA, KABUPATEN SIMALUNGUN KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH

**Jhon Harlen Sitompul**  
PWD SPs USU Medan

***Abstract:** The objective of the study is to know to where the extend of technical, impact of economic and socio-cultural and even economic promotion and advocacy of the rural community of Tanah Jawa Subregency of Simalungun Regency.*

*The method used in the study included a descriptive analysis and significance test (t-test). The used data included the primary one collected from the community, rural figures and rural institutions directly involved in the implementation of musrenbang and the secondary one collected from some related institutions.*

*The result of the study showed that there was a technical impact of economic and socio-cultural and even economic promotion and advocacy of the rural community viewed in capability of financial institutions in financial management, capability of the community owned-business agencies and the function and even role of the rural community institutions. In addition, there was a technical impact prior and after implemented the BKPN/K program, there was impact of economic promotion and advocacy of the rural community viewed in terms of the increased economic facilities of the community for increase in agricultural production and income of the community and even there was a difference of economic impact prior and after the BKPN/K program. There was socio-cultural impact of the economic promotion and advocacy of the rural community viewed in terms of the participation and mutual cooperation the community. There was a difference of socio-cultural impact prior and after implemented the BKPN/K program. There was an impact of economic promotion and advocacy of the rural community on the subregional development viewed in terms of the economic value of the subregencial area, land and even infrastructure.*

***Keywords:** promotion and advocacy, socio-economic and regional development*

## PENDAHULUAN

Pemberian bantuan keuangan kepada Nagori/Kelurahan merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak Nagori sesuai: PP 72 tahun 2005 tentang Desa, PP 73 tahun 2005 tentang kelurahan, Perda Kabupaten Simalungun Nomor 13 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori dan Perda Kabupaten Simalungun Nomor 14 tahun 2006 tentang Keuangan Nagori

Sejak pelaksanaannya mulai tahun 2004, kegiatan ini telah banyak menyerap anggaran, dengan melibatkan berbagai *stakeholders* termasuk masyarakat secara luas. Saat ini program ini telah memasuki tahun ke lima dengan sasaran kepada 331 Nagori/Kelurahan

Beberapa fakta teoritik yang terkait dengan masalah atau hambatan dalam

pembangunan perdesaan dapat dilihat dari penelitian Adisasmita (2004), yang menyatakan bahwa beberapa penyebab belum tercapainya perwujudan pembangunan daerah perdesaan yang serasi dan berkeadilan umumnya disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah: a). belum meratanya distribusi faktor produksi dan prasarana (fisik dan non fisik) ke seluruh desa, b) masih terdapatnya desa dan kawasan perdesaan yang tertinggal akibat manajemen pembangunan yang cenderung berorientasi pada sentralisasi dan adanya konsentrasi pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat daerah perdesaan yang maju, c) belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi perdesaan yang bertumpu pada keunggulan geografis dan sumberdaya intelektual lokal sekaligus basis ekonomi dalam pembangunan

perdesaan, dan d) belum optimalnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan desa

Permasalahan yang dihadapi dalam program pembangunan perdesaan yang bersumber dari dana bantuan adalah ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dalam penggunaan dana bantuan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BKPNK) di Kabupaten Simalungun, diupayakan kegiatannya dimusyawarahkan dengan seluruh masyarakat melalui suatu wadah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mengacu kepada tujuan Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BKPNK) yang ditetapkan Bupati Simalungun dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan di Kabupaten Simalungun Tahun 2006 No.412.6/3231/BPMN tanggal 22 Maret 2006, penggunaan BKPNK sebagai berikut: pembangunan prasarana/sarana perhubungan, pembangunan prasarana/sarana sosial, prasarana/sarana penunjang ekonomi masyarakat dan produksi, serta prasarana/sarana pemasaran

Kegiatan tersebut belum pernah diteliti sampai sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat, baik jika dilihat dari aspek teknis pelaksanaan, ekonomi, lingkungan dan maupun sosial ekonomi dan budaya

Penetapan jenis kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BKPNK) dilaksanakan berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes sebagai forum musyawarah para pihak berkepentingan di tingkat desa dalam meyakinkan rencana tahunan pembangunan

Oleh karena itu, dalam mengevaluasi dampak pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat melalui BKPNK difokuskan kepada aspek/kriteria teknis (kemampuan lembaga pengelolaan keuangan, kemampuan lembaga usaha milik masyarakat, serta fungsi dan peranan kelembagaan masyarakat desa), aspek/kriteria ekonomi (sarana ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan pendapatan masyarakat) dan aspek/kriteria

sosial budaya (partisipasi atau swadaya gotong royong masyarakat) serta kaitannya dengan pengembangan wilayah (nilai ekonomi wilayah/lahan dan infrastruktur wilayah).

## METODE

Teknik analisa data yang dipergunakan untuk mengetahui perbedaan dampak (teknis, ekonomi dan sosial budaya) sebelum dan setelah dilaksanakan kegiatan dari Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan adalah uji beda berpasangan (*paired t-test*), yaitu teknik pengujian pada sampel dua berpasangan (Sudjana, 1992).

## HASIL

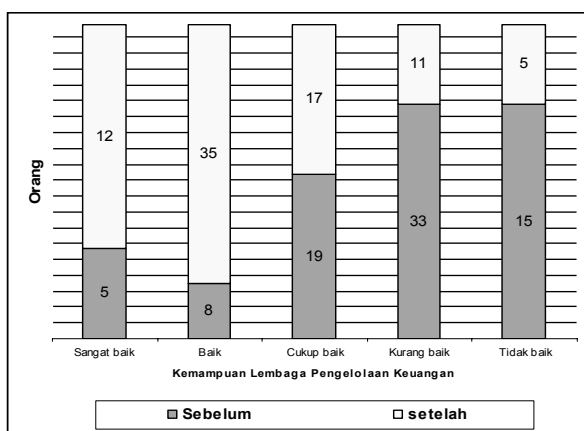
Kondisi wilayah Kecamatan Tanah Jawa sebagai kecamatan dengan jumlah desa/nagori paling banyak (20 nagori) sebelum adanya program Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori atau Kelurahan (BKPN/K) secara umum belum mampu mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal yang paling nyata di lapangan menyangkut ketersediaan sarana jalan yang menghubungkan sentra pertanian pada setiap nagori dengan pemukiman penduduk, sehingga petani mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian dari lahan pertanian ke pasar. Dengan kondisi demikian, maka dalam Musrenbang Desa yang dilakukan setiap nagori, sebagian besar merencanakan pembangunan fisik dalam bentuk penataan kondisi jalan, seperti pembatuan, pembuatan paret berpasangan dan pembangunan jembatan. Secara rinci kondisi masing-masing nagori di Kecamatan Tanah Jawa sebelum dan setelah adanya program Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori atau Kelurahan (BKPN/K).

### Dampak Teknis Pembinaan dan Pematapan Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Dampak teknis pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat perdesaan melalui Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BKPNK) berdasarkan persepsi sampel masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini diukur dari aspek kemampuan lembaga pengelolaan keuangan, kemampuan lembaga usaha milik masyarakat, serta fungsi dan peranan kelembagaan masyarakat desa dalam melaksanakan program pembangunan di desa.

Responden mempersepsikan dampak teknis dari kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan BKPNK di setiap nagori/kelurahan. Mengingat kegiatan yang dilakukan di setiap nagori/kelurahan berbeda sesuai dengan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat, maka responden penelitian memberikan persepsi sesuai kegiatan yang dilakukan di desanya.

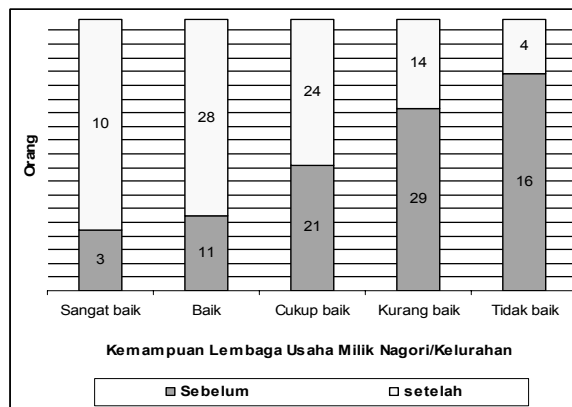
Sebelum dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat, yang menyatakan kemampuan lembaga pengelola keuangan sebesar 5 orang (6,2%) yang menyatakan sangat baik, setelah program ada peningkatan 7 orang yang menyatakan sangat baik menjadi 12 orang (15,0%). Demikian juga pada kategori baik 8 orang (10,0%) ada peningkatan 27 orang yang menyatakan baik setelah program menjadi 35 orang (43,8%). Sementara itu responden yang menyatakan kategori cukup baik berkurang 2 orang dari 19 orang (23,8%) menjadi 17 orang (21,2%), kategori kurang baik juga berkurang 22 orang dari 33 orang (41,2%) menjadi 11 orang (13,8%), serta kategori tidak baik berkurang 10 orang dari 15 orang (18,8%) menjadi 5 orang (6,2%)



**Grafik 1. Tanggapan terhadap Kemampuan Lembaga Pengelola Keuangan**

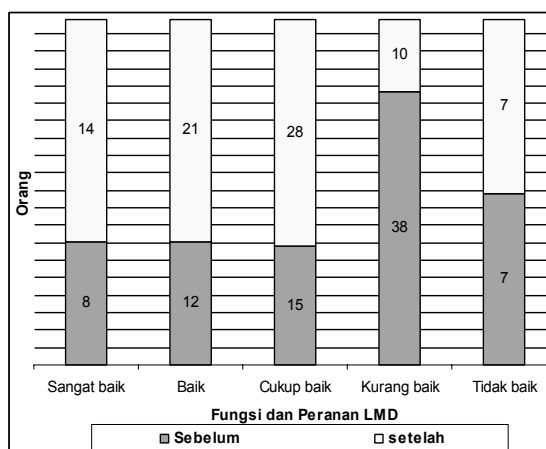
Kemampuan lembaga usaha milik masyarakat sebelum program, sebanyak 3 orang (3,8%) yang menyatakan sangat baik, setelah program ada peningkatan 7 orang yang menyatakan sangat baik menjadi 10 orang (12,5%). Demikian juga pada kategori baik, dari 11 orang (13,8%) sebelum program ada peningkatan 17 orang yang menyatakan baik setelah program menjadi 28 orang (35,0%), responden yang menyatakan kategori cukup baik bertambah 3 orang dari 21 orang (26,2%) menjadi 24 orang (30,0%) Sementara itu, kategori kurang baik

berkurang 15 orang dari 29 orang (36,2%) menjadi 14 orang (17,5%), serta kategori tidak baik berkurang 12 orang dari 16 orang (20,0%) menjadi 4 orang (5,0%) setelah dilakukan program.



**Grafik 2. Tanggapan Responden terhadap Kemampuan Lembaga Usaha Milik Nagori/Kelurahan**

Fungsi dan peranan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) sebelum program, sebanyak 8 orang (10,0%) yang menyatakan sangat baik, setelah program ada peningkatan 6 orang yang menyatakan sangat baik menjadi 14 orang (17,5%). Demikian juga pada kategori baik, dari 12 orang (15,0%) sebelum program ada peningkatan 9 orang yang menyatakan baik setelah program menjadi 21 orang (26,2%), responden yang menyatakan kategori cukup baik bertambah 13 orang dari 15 orang (18,8%) menjadi 28 orang (35,0%). Sementara itu, kategori kurang baik berkurang 28 orang dari 38 orang (47,2%) menjadi 10 orang (12,5%), serta kategori tidak baik tetap 7 orang (8,8%) setelah dilakukan program.



**Grafik 3. Tanggapan Responden terhadap Fungsi dan Peran Lembaga Masyarakat Desa**



Pengukuran tingkat dampak teknis pembinaan dan pemantapan ekonomi masyarakat diukur berdasarkan perbandingan persepsi responden sebelum dan setelah dilakukan pembinaan dan pemantapan ekonomi masyarakat. Hasil uji statistik menunjukkan tingkat perbedaan yang bermakna ( $t_{hitung} = 9.339$ ) lebih besar dari ( $t_{tabel} = 1,664$ ), artinya terdapat perbedaan yang positif dan signifikan dampak teknis sebelum dan setelah dilakukan pembinaan dan pemantapan ekonomi masyarakat. Nilai *sign* sebesar 0,000 pada uji *t-test* menunjukkan bahwa dampak teknis berbeda sebelum dilakukan pembinaan dan pemantapan ekonomi masyarakat dengan setelah dilakukan.

Sesuai dengan uraian tentang monitoring program alokasi dana desa dalam [www.fppm.org](http://www.fppm.org) (2008) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan perdesaan perlu pendampingan dalam peningkatan kapasitas pemeran/pelaku, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program

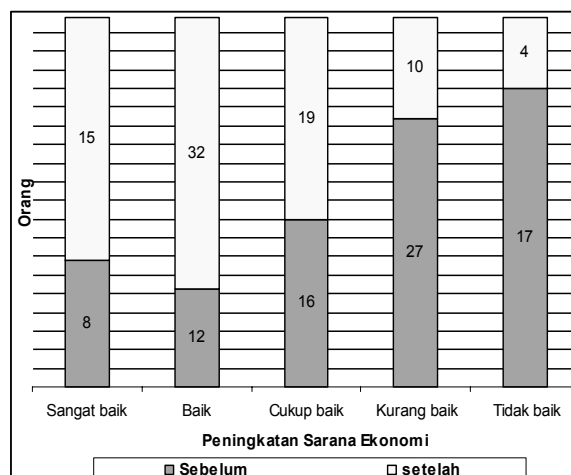
**PEMBAHASAN**

**Dampak Ekonomi Pembinaan dan Pemantapan Ekonomi Masyarakat Perdesaan**

Dampak ekonomi pembinaan dan pemantapan ekonomi masyarakat perdesaan melalui Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BKPNK) berdasarkan persepsi sampel masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini diukur dari aspek peningkatan sarana ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan masyarakat.

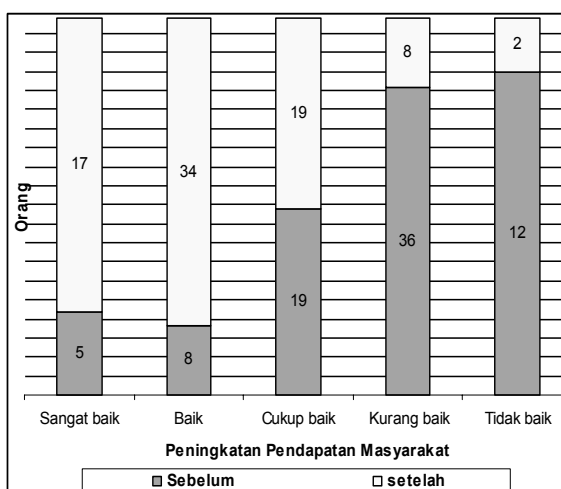
Peningkatan sarana ekonomi sebelum program, sebanyak 8 orang (10,0%) yang menyatakan sangat baik, setelah program ada peningkatan 7 orang yang menyatakan sangat baik menjadi 15 orang (18,8%). Demikian juga pada kategori baik, dari 12 orang (15,0%) sebelum program ada peningkatan 20 orang yang menyatakan baik setelah program menjadi 32 orang (40,0%), responden yang menyatakan kategori cukup baik bertambah 3 orang dari 16 orang (20,0%) menjadi 19 orang (23,8%). Sementara itu, kategori kurang baik berkurang 17 orang dari 27 orang (33,8%) menjadi 10 orang (12,4%), serta kategori

tidak baik berkurang 13 orang dari 17 orang (21,2%) menjadi 4 orang (5,0%) setelah dilakukan program.



**Grafik 4. Tanggapan Responden terhadap Peningkatan Sarana Ekonomi**

Peningkatan pendapatan masyarakat sebelum program, sebanyak 5 orang (6,2%) yang menyatakan sangat baik, setelah program ada peningkatan 12 orang yang menyatakan sangat baik menjadi 17 orang (21,2%). Demikian juga pada kategori baik, dari 8 orang (10,0%) sebelum program ada peningkatan 26 orang yang menyatakan baik setelah program menjadi 34 orang (42,5%), responden yang menyatakan kategori cukup baik tetap 19 orang (23,8%). Sementara itu, kategori kurang baik berkurang 28 orang dari 36 orang (45,0%) menjadi 8 orang (10,0%), serta kategori tidak baik berkurang 10 orang dari 12 orang (15,0%) menjadi 2 orang (2,5%) setelah dilakukan program.



**Grafik 5. Tanggapan Responden terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Pengukuran tingkat dampak ekonomi pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat diukur berdasarkan perbandingan persepsi responden sebelum dan setelah dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat. Hasil uji statistik menunjukkan tingkat perbedaan yang bermakna ( $t_{hitung} = 13,253$ ) lebih besar dari ( $t_{tabel} = 1,664$ ), artinya terdapat perbedaan yang positif dan signifikan dampak ekonomi sebelum dan setelah dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat. Nilai *sign* sebesar 0,000 pada uji *t-test* menunjukkan bahwa dampak ekonomi berbeda sebelum dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat dengan setelah dilakukan.

Sesuai pendapat Miraza (2005) yang menyatakan pengembangan wilayah adalah pemanfaatan potensi wilayah, baik potensi alam maupun potensi buatan, harus dilaksanakan secara *fully* dan *efficiency* agar potensi dimaksud benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara maksimal

**Dampak Sosial Budaya Pembinaan dan Pematapan Ekonomi Masyarakat Perdesaan**

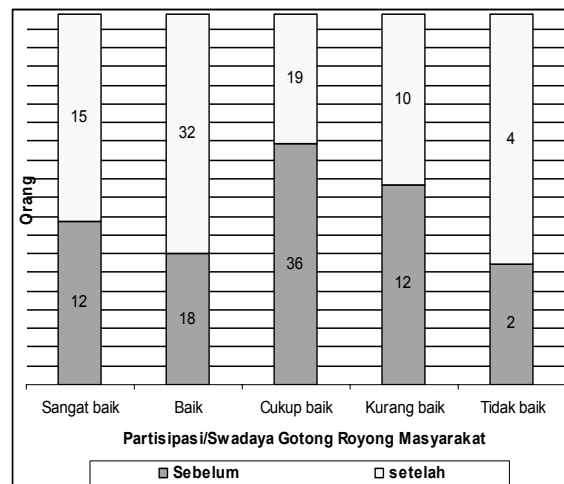
Dampak sosial budaya pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat perdesaan melalui Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BKPNK) berdasarkan persepsi sampel masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini diukur dari partisipasi atau swadaya gotong royong masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong sebelum dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat sebagian besar menyatakan cukup baik yaitu 45,0%, selanjutnya kategori baik 22,5%, kategori sangat baik dan kurang baik 15,0%, serta kategori tidak baik 2,5%. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong termasuk dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan sebelum dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat cenderung pada kategori cukup.

Setelah adanya pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat diketahui adanya perubahan yang semakin baik

terhadap sarana penunjang perekonomian masyarakat, dimana sebagian besar menyatakan baik yaitu 40,0%, selanjutnya kategori cukup baik 28,8%, kategori sangat baik 21,2%, kategori kurang baik 8,8%, serta kategori tidak baik hanya 1,2%.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, dimana sebelum dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat sebesar 45,0% responden yang menyatakan kategori cukup baik, namun setelah dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi 40,0% pada kategori baik.



**Grafik 6. Tanggapan Responden tentang Partisipasi atau Swadaya Gotong Royong Masyarakat**

Pengukuran tingkat dampak sosial budaya pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat diukur berdasarkan perbandingan persepsi responden sebelum dan setelah dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat.

Hasil uji statistik menunjukkan tingkat perbedaan yang bermakna ( $t_{hitung} = 9,317$ ) lebih besar dari ( $t_{tabel} = 1,664$ ), artinya terdapat perbedaan yang positif dan signifikan dampak sosial budaya sebelum dan setelah dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat. Nilai *sign* sebesar 0,000 pada uji *t-test* menunjukkan bahwa dampak sosial budaya berbeda sebelum dilakukan pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat dengan setelah dilakukan.

Sesuai studi Riantri (2002) yang menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat perdesaan membutuhkan kepedulian orang sekampung. Pemberdayaan atau *empowering* mampu mengangkat wawasan pandang masyarakat desa terhadap apa yang dialaminya sekarang dan akan datang apabila dia tidak merubah sikap.

### **Dampak Pembinaan dan Pemanfaatan Ekonomi Masyarakat terhadap Pengembangan Wilayah**

Aspek pengembangan wilayah yang terkait dengan pembinaan dan pemanfaatan ekonomi masyarakat berdasarkan persepsi sampel masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini diukur dari nilai ekonomi wilayah/lahan dan infrastruktur wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan nilai ekonomi lahan di 20 Nagori yang terdapat di Kecamatan Tanah Jawa setelah dilakukan pembinaan dan pemanfaatan ekonomi masyarakat sebagian besar menyatakan cukup baik yaitu 37,5%, baik 26,3%, sangat baik dan kurang baik 16,3%, serta tidak baik 3,8%.

Demikian juga dengan kriteria peningkatan infrastruktur wilayah, sebagian besar menyatakan baik yaitu 38,8%, cukup baik 26,3%, sangat baik 22,5%, kurang baik 11,3%, serta tidak baik hanya 1,3%.

Berdasarkan tanggapan responden terhadap kriteria pengembangan wilayah dengan adanya pembinaan dan pemanfaatan ekonomi masyarakat melalui Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BKPNK) dapat dijelaskan bahwa aspek yang paling mengalami peningkatan adalah infrastruktur wilayah, sedangkan nilai lahan meskipun mengalami peningkatan tidak sebesar peningkatan infrastruktur wilayah. Hal ini sesuai dengan bentuk kegiatan atau pembangunan yang dilakukan di setiap nagori/kelurahan dominan pada kegiatan fisik seperti pembangunan prasarana jalan.

Program Bantuan Keuangan Pembangunan Nagori/Kelurahan di Kecamatan Tanah Jawa mampu meningkatkan infrastruktur wilayah, dengan adanya pembangunan sarana fisik jalan, seperti pembuatan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan paret berpasangan di sepanjang jalan.

Sesuai dengan tujuan program BKPNK, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagori, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan senantiasa melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja tanpa diberi upah. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki terhadap sarana yang dibangun, serta memiliki kemauan untuk memelihara sarana tersebut..

Pengelolaan dana yang bersumber dari BKPNK, sesuai dengan pedoman dilakukan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, serta melibatkan unsur-unsur kelambagaan yang ada di desa. Sistem pengelolaan anggaran disesuaikan untuk pembelian bahan-bahan dan peralatan.

Banyak fenomena yang timbul dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Masalah utama dalam pembangunan wilayah adalah ketimpangan ruang (wilayah). Artinya ketimpangan juga terjadi antara daerah, karena itu pemerataan pembangunan berarti juga terjadi antara daerah, karena itu pemerataan pembangunan berarti juga suatu usaha dalam menyeimbangkan kemampuan wilayah untuk berkembang (Sirojuzilam, 2005).

### **KESIMPULAN**

1. Terdapat dampak teknis pembinaan dan pemanfaatan ekonomi masyarakat perdesaan dilihat dari aspek kemampuan lembaga pengelolaan keuangan, kemampuan lembaga usaha milik masyarakat, serta fungsi dan peranan kelembagaan masyarakat desa. Serta terdapat perbedaan dampak teknis sebelum dan setelah program BKPN/K.
2. Terdapat dampak ekonomi pembinaan dan pemanfaatan ekonomi masyarakat perdesaan dilihat dari peningkatan sarana ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Serta terdapat perbedaan dampak ekonomi sebelum dan setelah program BKPN/K.
3. Terdapat dampak sosial budaya pembinaan dan pemanfaatan ekonomi masyarakat perdesaan dilihat dari partisipasi atau swadaya gotong royong masyarakat. Serta terdapat perbedaan dampak sosial budaya sebelum dan setelah program BKPN/K.

4. Terdapat dampak pembinaan dan pematapan ekonomi masyarakat perdesaan terhadap pengembangan wilayah dilihat dari aspek nilai ekonomi wilayah/lahan dan infrastruktur wilayah.

#### SARAN

1. Program pemberian bantuan pembangunan desa melalui BKPN/K perlu ditingkatkan, bahkan perlu ditambah alokasi dana bantuan, karena secara teknis, ekonomi dan sosial budaya mampu meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat desa untuk lebih mandiri.
2. Pengelola dana bantuan pembangunan desa (aparatur nagori) hendaknya diberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Perlu sosialisasi program ke aparat nagori maupun masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami tentang perangkat nagori serta program pembangunan yang akan dilaksanakan.
4. Penggunaan dana bantuan pembangunan desa seperti BKPN/K hendaknya ditujukan untuk pengembangan potensi wilayah (desa).
5. Perlu koordinasi antara Dinas Bina Marga, Kimbangwil, Pengairan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kesehatan dan Pendidikan dalam penyusunan program serta pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

#### DAFTAR RUJUKAN

Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Jakarta

BPMN Simalungun, 2005. *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Nagori dan Kelurahan (BPN/K)*, Pematangsiantar

*Kecamatan Tanah Jawa, Dalam Angka*, 2008. Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun.

Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/5308/BPMN. 2005. *Bantuan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BPN/K) Kabupaten Simalungun*, Pematangsiantar.

Pemerintahan Nagori, 2008. *Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagori Bagi 329 Nagori Sekabupaten Simalungun*, Pematangsiantar.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 9 Tahun 2002. *Tentang Pemekaran 9 Kecamatan Baru*, Pematangsiantar.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 tahun 2007 *Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa*, Pematangsiantar.

Miraza, Hassan., 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Bandung-Koordinator Jawa Barat, Bandung.

Riantri. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan*, Jakarta.

Sirojuzilam, 2005. *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Bandung. (<http://www.fppm.org/Monitoring>). *Program Alokasi Dana Desa* (diakses 15 Desember, 2008)

# DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA (Studi Kasus: Wilayah Pantai Timur)

**Marganda Simamora**  
Marganda\_ngs@yahoo.co.id

**Sirojuzilam**  
siro\_juzilam@yahoo.co.id

***Abstract:** Economic growth is one of main factors of economic development. It is true that development process affected not only by economic factor such as natural resources, capital accumulation, organization, technological progress, labour specialization, and production scale but also by non economic factor such as social factor, human factor, politic factor, and administrative factor.*

*The research is aimed at analyzing determinan factors of regional economic growth in North Sumatera, with area boundary in East Shore in the periods of 1994-2006 using Fixed Effect Model (FEM).*

*Estimation result with pooled data using Fixed Effect Model (FEM) show that value added of region industry and government expenditures are positively and significantly affecting economic growth in North Sumatera. Population density is negatively but not significantly affecting economic growth in North Sumatera.*

***Keywords:** value added, government expenditures, population density and economic growth*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, walaupun disadari bahwa proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh faktor ekonomi seperti: sumberdaya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja dan skala produksi tetapi juga faktor nonekonomi seperti: faktor sosial, faktor manusia, faktor politik dan administratif.

Pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional semakin meningkat dalam era otonomi karena dalam era otonomi, masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Hal ini sangat penting artinya bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya (Syafrizal, 2008)

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Salah satu cara untuk

menilai prestasi pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PDB menurut harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar (Sukirno, 2004). Untuk tingkat daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu bagian penting dari proses pertumbuhan ekonomi adalah pergeseran struktur produksi atau perubahan komposisi PDB atau PDRB menurut sektor dan lapangan usaha. Berkaitan dengan pergeseran pada struktur produksi tersebut, peranan sektor pertanian dalam PDB atau PDRB cenderung semakin menurun. Sedangkan peranan sektor-sektor lain – sektor industri dan jasa – semakin meningkat. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan karena memiliki dasar tukar yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Utara

2005-2025 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 8,2 persen per tahun dan pendapatan per kapita masyarakat mencapai US\$7.100 dengan jumlah penduduk miskin di bawah 5 persen. Kondisi tersebut dicapai melalui perbaikan struktur ekonomi Sumatera Utara dan persebaran pertumbuhan masing-masing sektor yang harmonis sehingga perekonomian Sumatera Utara semakin kokoh. Hal itu terlihat dari keterkaitan yang kuat antara sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) dan sektor tertier (perdagangan, keuangan dan jasa-jasa). Kontribusi sektor sekunder diperkirakan akan mencapai 45 persen, sektor primer sebesar 20 persen, sektor tertier sebesar 25 persen dan lain-lainnya sebesar 15 persen.

Berdasarkan topografi daerah, Sumatera Utara dibagi atas tiga bagian yaitu wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km<sup>2</sup> atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara, wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat yang sebagian besar wilayah pegunungan seluas 46.758,69 Km<sup>2</sup> atau 65,23% dari luas wilayah Sumatera Utara.

Wilayah Pantai Timur merupakan daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi. Dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara tahun 2001, wilayah Pantai Timur menyumbang 67,08% dan pada tahun 2003 menyumbang 71,21%. Demikian pula PDRB per kapita rata-rata wilayah Pantai Timur mencapai Rp. 2.230.310. (Tampubolon, 2001) Dilihat dari nilai tambah industri, pada tahun 2001, kontribusi wilayah Pantai Timur sebesar 8,085 triliun rupiah (94,23% dari total nilai tambah industri Sumatera Utara) dan pada tahun 2003 sebesar 9,886 triliun rupiah (89,30%)

Wilayah Pantai Timur cenderung semakin padat dari tahun ke tahun karena arus migrasi dari wilayah Pantai Barat dan dataran tinggi. Pada tahun 2001, jumlah penduduk wilayah Pantai Timur 7.165.983 jiwa (61,09%) dengan kepadatan  $\pm 287$  jiwa/Km<sup>2</sup> dan pada tahun 2003, jumlah penduduk wilayah Pantai Timur 7.378.654

jiwa (62,06%) dengan kepadatan  $\pm 296$  jiwa/Km<sup>2</sup>. Pada dasarnya migrasi ini didasari satu tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan sampai dengan kebutuhan sekunder lainnya. Penduduk yang besar jumlahnya merupakan pasar yang sangat baik bagi berbagai hasil industri. Di samping itu, kepadatan penduduk berkorelasi dengan tumbuhnya pusat-pusat aktivitas ekonomi (Arsjad, 1993).

Pengeluaran pemerintah daerah juga merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk wilayah Pantai Timur, pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dari 2.547,5 milyar rupiah pada tahun 2002 menjadi 3.415,8 milyar rupiah pada tahun 2003 atau meningkat sebesar 34,08%. Proporsi pengeluaran pemerintah wilayah ini sebesar 54,3% dari total pengeluaran pemerintah Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka kajian dari penelitian ini adalah untuk meneliti determinan pertumbuhan ekonomi regional Sumatera Utara, khususnya wilayah Pantai Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah nilai tambah industri daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah Pantai Timur.
2. Apakah pengeluaran pemerintah daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah Pantai Timur.
3. Apakah kepadatan penduduk daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah Pantai Timur.

## METODE

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pengkajian mengenai determinan pertumbuhan

ekonomi regional Sumatera Utara, khususnya Wilayah Pantai Timur selama kurun waktu 1994-2007 (14 tahun).

**2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data panel untuk 8 kabupaten/kota Pantai Timur Sumatera Utara selama kurun waktu 1994-2007 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara dan juga data berdasarkan buku/jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

**3. Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan teknik analisis data panel, teori *Generalized Least Square* (GLS) yaitu: *The Fixed Effect Model* (Metode Efek Tetap).

Model ini memiliki *intercept* persamaan yang tidak konstan atau terdapat perbedaan pada setiap individu (data *cross section*). Sementara itu, *slope* koefisien dari regresi tidak berbeda pada setiap individu dan waktu. FEM digunakan apabila data *time series* lebih besar dari data *cross section*.

Secara sistematis FEM dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{1it} + \gamma_2 W_{2t} + \gamma_3 W_{3t} + \dots + \gamma_N W_{Nt} + \sigma_2 Z_{i2} + \sigma_3 Z_{i3} + \dots + \sigma_T Z_{iT} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

$Y_{it}$  = Variabel terikat untuk individu ke-i dan waktu ke-t

$X_{it}$  = Variabel bebas untuk individu ke-i dan waktu ke-t

$W_{it}$  dan  $Z_{it}$  variabel dummy yang didefinisikan sebagai berikut:

$W_{it}$  = 1; untuk individu i; i= 1,2,3,...,N  
 = 0; lainnya

$Z_{it}$  = 1; untuk individu i; i= 1,2,3,...,N  
 = 0 lainnya

Model persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

i = Kabupaten/kota (1, 2, ..., 8)

t = Tahun (1993, 1994, ..., 2006)

$Y_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi Regional/ PDRB (milyar)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Nilai Tambah Industri Daerah (milyar)

$X_2$  = Pengeluaran Pemerintah Daerah (milyar)

$X_3$  = Kepadatan Penduduk Daerah (orang/km<sup>2</sup>)

$\mu_{it}$  = Term Error

**HASIL**

**Gambaran Perekonomian Wilayah Pantai Timur**

Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun disajikan perubahan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa secara umum, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan wilayah Pantai Timur mengalami peningkatan sebelum terjadi krisis ekonomi tahun 1997/1998.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah Pantai Timur tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang terjadi di tingkat nasional dan regional, khususnya di Sumatera Utara. Seperti yang terjadi pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurun hingga 10,90 persen sehingga mempengaruhi perekonomian di wilayah Pantai Timur. Kondisi yang demikian tercermin dari anjloknya pertumbuhan ekonomi di Wilayah Pantai Timur yang juga mengalami kontraksi dengan pertumbuhan minus kecuali pada daerah Labuhan Batu, Asahan dan Tanjung Balai. Namun sejak tahun 1999, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional di Indonesia terlihat mulai adanya perbaikan ekonomi di hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara yang tentunya akan berpengaruh terhadap wilayah Pantai Timur.

Sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997/1998, perekonomian wilayah Pantai Timur tidak terlalu buruk. Pada saat itu kontribusi dari sektor ekonomi cukup berkembang, selanjutnya pada tahun berikutnya mengalami sedikit penurunan walaupun tidak terlalu signifikan sehingga

pada tahun 1996 kembali pada posisi 8,29 persen. Hal ini diakibatkan meningkatnya peranan dari beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi.

Namun sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, terjadi perubahan yang signifikan dibanding tahun yang sebelumnya. Perekonomian mengalami perlambatan. Dampak krisis moneter yang berlangsung sejak semester II 1997 sampai dengan semester I 1998 tersebut berpengaruh terhadap perekonomian misalnya terlihat dari terdepresiasi nilai Dollar, inflasi yang melonjak hingga posisi 40,79% pada

semester I tahun 1998 meningkat dari tahun 1997 yang berada pada level 9,96%.

Di samping itu pengaruh dari sektor non-ekonomi juga turut mempengaruhi perekonomian Indonesia yang selanjutnya berpengaruh terhadap perekonomian Sumatera Utara khususnya wilayah Pantai Timur seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan dan kondisi politik yang tidak stabil.

Sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, wilayah Pantai Timur memiliki kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan Sumatera Utara, seperti yang tertera pada Tabel 2.

**Tabel 1. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Wilayah Pantai Timur, Tahun 1994 – 2006 (milyar rupiah)**

Kab/Kota Tahun	Labuhan Batu	Asahan	Deli Serdang	Langkat	Tanjung Balai	Tinggi Tinggi	Medan	Binjai	Pantai Timur
1994		2084,19	2293,8	1317,78	68,9	283,65	4686,6	273,2	12638,1
1995	1780,55	2292,1	2646,1	1456,24	284,6	262,19	4992,6	299,5	14013,88
1996	1967,2	2527,92	2961,8	1579,4	299,68	335,17	5481,07	324,5	15476,74
1997	2199,85	2750,5	3087	1891,4	327,36	348,11	5903,11	337,4	16844,73
1998	2226,2	2779,5	2818,6	1868,3	354,72	294,03	4833,9	294,37	15469,62
1999	2337	2926,5	2910,5	1879,2	376,1	302,5	5003,9	307,4	16043,1
2000	2476,4	3106,2	3079,1	1913,5	348,08	312	5274,1	328,33	16837,71
2001	5936,47	8220,03	11641,07	5161,33	912,88	718,14	19828,07	1156,61	53574,6
2002	6195,83	8426,6	12303,92	5319,844	962,53	760,46	20819,42	1233,4	56022,004
2003	6485,54	9037,63	12928,5	5476,89	1034,66	795,66	22017,77	1345,3	59121,95
2004	6731,96	9484,02	10478,37	5532,16	1096,23	839,64	23623,13	1466,45	59251,96
2005	7010,75	9768,12	10999,4	5724,04	1141,3	876,4	25272,4	1531,9	62324,31
2006	7361,8	10202,23	11577,5	5886,6	1181,7	923,3	27210,12	1613,4	65956,65

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 1994-2007

**Tabel 2. Kontribusi PDRB Wilayah Pantai Timur terhadap Pembentukan PDRB Sumatera Utara, Tahun 1997-2005 (%)**

Kabupaten/Kota	1997	1998	2000	2005
Labuhan Batu	8,68	9,47	9,71	7,87
Asahan	10,86	11,82	12,19	10,96
Deli Serdang	12,19	11,99	12,08	12,37
Langkat	7,47	7,71	7,51	6,42
Tanjung Balai	1,48	1,48	1,46	1,28
Tebing Tinggi	1,37	1,25	1,22	0,98
Medan	23,30	20,56	20,69	28,37
Binjai	1,33	1,25	1,29	1,73
Total Kontribusi Terhadap PDRB Sumut	66,68	65,53	66,15	69,98

Sumber: BPS, data diolah



Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 1997, wilayah Pantai Timur memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara yaitu 66,68 persen, dimana Kota Medan memberi kontribusi yang paling besar yaitu 23,30 persen dan kota Binjai memberi kontribusi yang paling kecil yaitu 1,33 persen. Pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998, kontribusi wilayah Pantai Timur mengalami penurunan menjadi 65,53 persen (turun sebesar 1,72 persen dari tahun 1997). Secara umum, selama kurun waktu 1997-2005, kontribusi wilayah Pantai Timur terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara mengalami peningkatan.

## PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Nilai Tambah Industri Wilayah Pantai Timur

Industri besar dan sedang diharapkan bisa memberi nilai tambah yang besar sehingga bisa meningkatkan perekonomian. Nilai tambah industri besar dan sedang meningkat selama kurun waktu 1994-1996 sebesar 18,84 persen. Pada tahun 1997, pada awal krisis ekonomi, nilai tambah industri besar dan sedang turun sebesar 9,18 persen. Tetapi pada tahun 1998 peningkatan nilai tambah industri mencapai 73,17 persen dibanding dengan tahun 1997. Peningkatan ini lebih disebabkan karena naiknya nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah sehingga meningkatkan nilai pemakaian bahan baku dan produksi, terutama untuk barang yang diekspor.

Sesuai dengan jumlah perusahaan dan penyerapan tenaga kerja, penghasil nilai tambah berkonsentrasi di tiga (3) daerah meliputi kabupaten Deli Serdang, kota Medan dan kabupaten Asahan. Pada tahun 2005, nilai tambah dari daerah tersebut mencapai 53,57 persen dari total nilai tambah industri besar dan sedang di Sumatera Utara. Kabupaten Asahan merupakan daerah yang menghasilkan nilai tambah terbesar sebesar 3626 milyar rupiah, kabupaten Deli Serdang dimana jumlah perusahaan dan penyerapan tenaga kerja menduduki peringkat pertama namun dalam menghasilkan nilai tambah, kabupaten Deli Serdang menempati posisi ketiga sebesar 1395,11 milyar rupiah. Sedangkan kota Medan menduduki peringkat

kedua dengan nilai tambah sebesar 2168,13 milyar.

### 2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Wilayah Pantai Timur

Pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besar kecilnya pengeluaran ini sangat dipengaruhi atau sangat tergantung pada besarnya penerimaan. Makin besar penerimaan maka pengeluaran akan semakin besar pula.

Selama kurun waktu 1994-2006, proporsi pengeluaran pemerintah wilayah Pantai Timur terhadap total pengeluaran pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara berfluktuatif tapi secara umum proporsi pengeluaran pemerintah wilayah Pantai Timur terhadap total pengeluaran pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera cukup besar, seperti yang tertera pada Tabel 3.

Setiap kabupaten/kota yang termasuk wilayah Pantai Timur mengalami kenaikan pengeluaran pemerintah selama kurun waktu 1994-2006, kenaikan yang paling tinggi terjadi pada tahun 1998, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 65 persen dari tahun 1997. Kota Medan merupakan daerah dengan pengeluaran pemerintah dengan jumlah terbesar dari tahun ke tahun dan kota Tanjung Balai merupakan daerah dengan pengeluaran pemerintah dengan jumlah terkecil.

### 3. Perkembangan Kepadatan Penduduk Wilayah Pantai Timur

Penyebaran penduduk menurut wilayah geografis terlihat tidak merata, dimana hampir 60 persen penduduk berada di wilayah Pantai Timur dan proporsi ini terus mengalami kenaikan selama periode 1971-2005. Proporsi ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Berbeda dengan wilayah Dataran Tinggi, proporsi penduduk yang tinggal di daerah ini sekitar 26 persen dan relatif menunjukkan penurunan. Sedangkan untuk wilayah Pantai Barat dapat dianggap relatif tetap yaitu sekitar 18 persen.

### 4. Hasil Regresi

Dari analisis FEM yang dilakukan dengan menggunakan program e-views 5.0 diperoleh hasil pada Tabel 4.

**Tabel 3. Proporsi Pengeluaran Pemerintah Wilayah Pantai Timur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Tahun 1994–2006**

Tahun	Total Pengeluaran Pemerintah Kab/Kota (milyar rupiah)	Pengeluaran Pemerintah Wilayah Pantai Timur (milyar rupiah)	Proporsi Pengeluaran Pemerintah Wilayah Pantai Timur terhadap Total Kab/Kota di Sumut (%)
1994	432.5	243.9	56.39
1995	544.8	312.2	57.31
1996	653.6	338.1	51.73
1997	823.4	409.7	49.76
1998	1298.9	676.4	52.07
1999	1666.7	850	51.00
2000	1614.2	834.3	51.69
2001	3852	1944.2	50.47
2002	4829.3	2547.5	52.75
2003	6290.1	3415.8	54.30
2004	6081.4	3271.4	53.79
2005	6907.6	3443.8	49.86
2006	8409.6	3569.5	42.45

Sumber: BPS, data diolah

**Tabel 4. Hasil Analisis dengan FEM**

	LBATU	ASAHAN	DSERDANG	LANGKAT	TJBALAI	TTINGGI	MEDAN	BINJAI
C?	-1446.75	-885.61	-528.99	-1843.9	-885.50	207.58	6815.5	-908.02
C				1788.34				
X1?				0.95 (2,97)				
X2?				14.27(14,34)				
X3?				-0.64 (-0,67)				
F				103,25				
R <sup>2</sup>				0.9181				

Keterangan: Angka dalam kurung adalah t-statistik dari masing-masing koefisien estimasi

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai tambah industri daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini disebabkan karena konsentrasi industri sedang dan besar secara absolut terbanyak jumlahnya di wilayah Pantai Timur. Pada tahun 1983-2004, total industri yang berada di wilayah Pantai Timur berjumlah 15.554 industri. Konsentrasi industri di wilayah Pantai Timur terutama berada di Medan, Deli Serdang dan Asahan. Dari nilai tambah industri, selama kurun waktu tahun 1994-2004, wilayah ini menyumbang Rp. 64.798 milyar. (Sirojuzilam, 2008).
2. Pengeluaran pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah untuk wilayah Pantai Timur meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi pengeluaran pemerintah wilayah ini sebesar 54,3% dari total pengeluaran pemerintah Sumatera Utara.

3. Kepadatan penduduk daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan tingkat kepercayaan 95%. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan kepadatan penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Pantai Timur, antara lain rendahnya kualitas *human capital* angkatan kerja yang melakukan aktivitas ekonomi. Dalam *endogenous growth theory*, Romer (1983, 1986) dan Lucas (1988) memasukkan faktor *human capital* (sumberdaya manusia) sebagai salah satu determinan pertumbuhan ekonomi. Dengan *human capital* yang berkualitas, kinerja ekonomi juga akan lebih baik.

Kualitas ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ataupun indikator-indikator lainnya. Wilayah Pantai Timur memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi tapi kualitas *human capital* wilayah ini rendah, yang dapat dilihat dari persentase penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja yang hanya menamatkan SD (Sekolah Dasar) cukup tinggi, yakni 20-38 persen sedangkan yang menamatkan pendidikan setingkat akademi dan sarjana hanya sebesar 3-10 persen.

Kemungkinan yang lain adalah karena tingginya tingkat pengangguran di wilayah Pantai Timur. Berbagai sudi empiris yang telah dilakukan oleh Amstrong dan Taylor (2001) dan Asplund (2001) membuktikan bahwa kepadatan penduduk dapat memberikan efek positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika sebagian besar penduduk (seperti: penduduk usia lanjut, anak-anak, dan para penganggur) tidak ikut berpartisipasi terhadap aktivitas ekonomi regional maka pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Kota Medan memiliki pertumbuhan ekonomi (dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan) yang paling tinggi, yakni sebesar Rp. 27.234,45 miliar pada tahun 2006 dan Rp 29.352,92 miliar pada tahun 2007 dan tingkat pengangguran terbuka juga tinggi yakni sebesar 15,01 persen pada tahun 2006 dan 14,49 persen pada tahun 2007. Tebing Tinggi merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah, dimana pertumbuhan ekonomi di daerah ini hanya sebesar Rp. 978,41 miliar (hanya 0,033 kali pertumbuhan ekonomi kota Medan pada tahun 2007) tetapi tingkat pengangguran yang tidak jauh berbeda dengan kota Medan, yakni sebesar 11,66 persen.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dirumuskan di atas maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melihat bahwa sektor industri memberikan nilai tambah yang besar maka diharapkan pemerintah Sumatera Utara, khususnya pemerintah di

kabupaten/kota wilayah Pantai Timur hendaknya membuat kebijakan yang mendukung perkembangan sektor industri dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perizinan, memberikan *tax holiday* bagi industri-industri yang baru beroperasi dan membangun infrastruktur yang lebih baik.

2. Pemerintah di kabupaten/kota wilayah Pantai Timur hendaknya memperhatikan pengeluaran pemerintah daerah agar tetap proporsional sehingga pengeluaran pemerintah tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena pengeluaran pemerintah yang terlalu besar dapat menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi, hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.
3. Untuk mengatasi kepadatan penduduk yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantai Timur, pemerintah perlu membuka lapangan kerja berupa industri rumah tangga dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengelola produk unggulan daerah tersebut sehingga kepadatan penduduk tersebut akan memberi nilai tambah bagi perekonomian.

## DAFTAR RUJUKAN

- Asplund, Patrik. 2001. *Growth and Agglomeration among Swedish Labour Market Areas 1985-1996*, Department of Economics, Umea University.
- Barro, Robert J and Sala-i-Martin, X. 2004 *Economic Growth*. Second Edition. McGraw-Hill, New York.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Edisi Pertama. Kencana, Jakarta.
- Boediono. 1998. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta.
- Heer, David. 1985. *Masalah Kependudukan Di Negara Berkembang*. PT. Bina Aksara, Jakarta.

- Jhingan. M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik. Cetakan Kespuluh*. BPFE, Yogyakarta.
- Nugroho. Y.S dan Soelistianingsih.2007. "Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional". Makalah pada Session Urban and Regional, Kampus UI, Depok.
- Nurwita, Sugiana dan Suryanto. 2005. "Analisis Spasial-Ekonomi Wilayah: Pengaruh Ekonomi Aglomerasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat 1991-1999". Jurnal Perencanaan Kota dan Daerah, vol 1, No.1. Edisi 1. FE UGM, Yogyakarta.
- Pratomo, Wahyu Ario dan Paidi Hidayat. 2007. *Pedoman Praktis Penggunaan Eviews dalam Ekonometrika*. Penerbit USU Press, Medan.
- Syafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Penerbit Baduose, Padang.
- Sirojuzilam. 2005. *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*. Penerbit ISEI, Bandung.
- Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi Perencanaan Regional*. Pustaka Bangsa Press.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Cetakan Kelimabelas. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Industrialisasi Di Negara Berkembang*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tampubolon, Dahlan. 2001. *Pembangunan dan Ketimpangan Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara*. Tesis Perencanaan Pembangunan, PPs USU.
- Widiyanti, Ninik. 1987. *Masalah Penduduk Kini Dan Mendatang*. Cetakan Pertama. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Statistik Industri menurut Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik \_\_\_\_\_, Sumatera Utara Dalam Angka, Badan Pusat Statistik.



# WAHANA HIJAU

*Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*

## INFORMASI BERLANGGANAN

(Biaya Berlangganan: Kota di Sumatera Rp 85.000/tahun dan Kota di luar Sumatera Rp 100.000/tahun)

### LEMBAR PEMESANAN

Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Kota : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
Lembaga : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pemesanan Tahun Terbitan: \_\_\_\_\_

Pembayaran Tunai  Transfer

Transfer melalui  
Rekening Bank Mandiri Cabang USU Medan  
a.n. Muhammad Yusuf  
No. Rekening: 106 – 00 – 0512719 – 9

### Alamat Redaksi

Ruang Studio, Program Studi PWD (S2)/Perencanaan Wilayah (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Jl. Prof. T. Maas, Kampus USU Medan 20155, Telepon 061-8212453  
<http://pwd.usu.ac.id>